

**RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM TEKS / LA GALIGO;
SUATU ANALISIS WACANA KRITIS MICHEL FOUCAULT**

Disertasi



Faisal

F013191008

Program Doktor Ilmu Linguistik

Universitas Hasanuddin

Makassar

2024

DISERTASI

**RELASI KUASA DAN PENGETAHUAN DALAM TEKS /
LA GALIGO; SUATU ANALISIS WACANA KRITIS MICHEL
FOUCAULT**

Disusun dan Diajukan oleh

FAISAL

NIM: F013191008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi

Pada tanggal 30 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat.

Menyetujui:
Komisi Penasihat



Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum.
Promotor



Prof. Dr. Lukman, M.S.
Kopromotor



Dr. Ade Yolanda Latjuba, S.S., M.A.
Kopromotor

Ketua Program Studi S-3 Ilmu Linguistik



Prof. Dr. Lukman, M.S.
NIP 196012311987021002

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP 196407161991031010

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Faisal

Nim : F013191008

Program Studi : Ilmu Linguistik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul **Relasi Kuasa dan Pengetahuan dalam Teks *I La Galigo*; Satu Analisis Wacana Kritis Michel Foucault** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan siproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan



Faisal

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran-Nya seraya mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan selesainya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar doktor dalam Program Studi Ilmu Linguistik Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Tema penting disertasi ini adalah menguak relasi kuasa dan pengetahuan pada karya sastra Bugis klasik *I La Galigo* berdasarkan analisis wacana kritis Michel Foucault. Proses penyusunan disertasi ini menghabiskan waktu yang cukup lama, akan tetapi berkat motivasi dan nasehat dari kedua orang tua, mertua, istri, saudara, keluarga, dan sahabat-sahabat terdekat serta saran dan bimbingan para pembimbing maka semangat ketekunan dan kesabaran akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum, selaku promotor yang secara khusus memberikan beberapa bahan bacaan yang diperlukan untuk memperkaya sumber penulisan disertasi ini, bahan bacaan tersebut

telah memperkaya wawasan penulis tentang I Lagaligo yang menjadi kajian utama dalam disertasi ini, serta membuka ruang diskusi dengan penulis untuk membicarakan gagasan dan ide-ide pembaharuan serta data-data yang diperlukan dalam penulisan disertasi ini.

2. Prof. Dr. Lukman, M.S, selaku Kopromotor I atas koreksi dan sarannya terhadap penulisan disertasi ini.
3. Ibu Dr.Ade Yolanda Latjuba, S.S., M.A, selaku Kopromotor II atas kesediaannya memberi koreksi, saran dan motivasi pada penulis selama penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Rapi, M.S. selaku penguji eksternal.
5. Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si., Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum., Dr. Ery Iswari, M.Hum., selaku penguji.
6. Prof. Dr. Akin Duli, M.A. Dekan FIB Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
7. Prof. Dr. Lukman, M.S, Ketua Prodi S3 Linguistik Universitas Hasanuddin, dan terkhusus dosen pada Program Studi Linguistik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program S3 pada sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi. Demikian juga kepada Kepala Tata Usaha dan jajarannya yang telah memberikan pelayanan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga terselesaikannya penyusunan disertasi ini.

8. Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. Rektor Universitas Negeri Makassar
9. Ayahanda Abdul Rasyid, Ibunda Hatijah, Ibu mertua Hadjrah BSW, serta istriku tercinta Siti Ina Tenripada Hasin, S.Pd yang tak henti-henti memberikan dukungan, doa dan nasehat untuk keberhasilan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan pada Program Doktor Ilmu Lingustik angkatan 2019 atas dukungan yang penuh kebersamaan, kekeluargaan, suka duka, motivasi, selama menempuh studi.
11. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan bantuan, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian disertasi ini, namun tidak sempat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga segala dedikasi dan bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Makassar, 30 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Relevan	15
2.2 Tinjauan Teoretis	17
1. Wacana	17
2. Analisis Wacana Kritis	23
3. Arkeologi Pengetahuan	28
4. Kuasa Pengetahuan (geneologi)	38
5. Hegemoni	47
6. Sastra dan I La Galigo	53

7. Kerangka Pikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Jenis Penelitian	68
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	69
3.3 Sumber Data	69
3.4 Defenisi Istilah	70
3.5 Instrument Penelitian	71
3.6 Teknik Pengumpulan Data	72
3.7 Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Wacana Pengetahuan dan Ideologi <i>I La Galigo</i> Episode <i>Mula Riulona</i> <i>Batara Guru</i>	75
1. Kejadian yang khas	76
2. Kondisi keberadaan wacana	88
3. Korelasi dengan pernyataan terkait	94
4. Bentuk lain pernyataan yang dikeluarkan	101
4.2 Relevansi Kuasa dan Pengetahuan (Geneologi Kuasa) dalam <i>Wacana I La Galigo</i> Episode <i>Mula Riulona</i> <i>Batara Guru</i>	116
1. Kuasa adalah strategi	117
2. Kekuasaan untuk produktif	123
3. Kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi	130
4. Kuasa ada di mana-mana	136

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	146
5.1 Simpulan	146
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	158

ABSTRACT

FAISAL. *The Relationship between Power and Knowledge in the Text of I La Galigo; A Michel Foucault's Critical Discourse Analysis* (supervised by Muhlis Hadrawi, Lukman and Ade Yolanda Latjuba)

Literature is related to the discourse of knowledge, ideology, and power. The literary discourse can be explored through language texts, the production and interpretation of texts, and the sociocultural practices of a society. *I La Galigo* as the object of research is court literature telling the ancient stories of Bugis social elite that underlie the socio-cultural experience of the period in order to produce knowledge discourse that has an effect on power. This research aims to describe the relation between power and knowledge in the *I La Galigo* discourse. The research method used is the descriptive method with two approaches to Michel Foucault's critical discourse analysis, namely archaeology and genealogy, to reveal the power and knowledge relations in the discourse of *I La Galigo*. The result of this research found knowledge discourse in *I La Galigo* that produces cultural ideologies such as archaeology of the empty world, archaeology of creation, archaeology of *Manurung*, earth order, underworld order (*Peretiwi*), upper world order (*Botting Langi*), and archaeology of warnings and threats. Knowledge discourse and truth regime in *I La Galigo* are closely related to power; power is exercised in many positions and relations according to its function. The forms of power and knowledge relations found in this research are power and mind relations and power relations with the body. Power and mind relations are in the form of belief, ideology, culture, politics, and dominance over the mind. While the form of power relations with the body takes the form of control, objectivation of the body, surveillance (panoptic), and regulations.

Key words: discourse, knowledge, power, Foucault, hegemony, and *I La Galigo*.

ABSTRAK

FAISAL. *Relasi Kuasa dan Pengetahuan dalam Teks I La Galigo; Satu Analisis Wacana Kritis Michel Foucault* (dibimbing oleh Muhlis Hadrawi, Lukman, Ade Yolanda Latjuba).

Sastra terkait dengan wacana pengetahuan, ideologi, dan kekuasaan. Wacana sastra dapat digali melalui teks-teks bahasa, produksi, dan interpretasi teks serta praktik sosiokultural dari sebuah kelompok masyarakat. *I La Galigo* sebagai karya sastra klasik mengusung ideologi pengetahuan dan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengetahuan dan relasi kuasa dalam wacana *I La Galigo*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan dua pendekatan analisis wacana kritis Michel Foucault, yaitu Arkeologi dan Geneologi. Objek penelitian ini, yaitu *I La Galigo* sebagai karya sastra istana yang menceritakan kisah-kisah purba sosial elit Bugis yang mendasari pengalaman sosial kultural periode tersebut dalam rangka produksi wacana pengetahuan yang berefek pada kekuasaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu simak dan catat. Data yang diperoleh dianalisis melalui lima tahap; (1) identifikasi; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi; dan (5) penarikan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pengetahuan dalam *I La Galigo* memproduksi ideologi kultural, seperti arkeologi dunia kosong, arkeologi penciptaan, arkeologi *Manurung*, kedatuan bumi, kedatuan dunia bawah (*peretiwi*), kedatuan dunia atas (*Botting Langi*), serta arkeologi peringatan-peringatan dan ancaman. Wacana pengetahuan pada *I La Galigo* berkaitan erat dengan kuasa. Kuasa dilaksanakan dalam banyak posisi dan relasi sesuai dengan fungsinya. Adapun bentuk relasi kuasa dan pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu relasi kuasa dan pikiran serta relasi kuasa dengan tubuh. Relasi kuasa dan pikiran berupa kepercayaan, ideologi, budaya, politik, serta dominasi atas pikiran. Sedangkan bentuk relasi kuasa dengan tubuh berbentuk kontrol, objektivasi terhadap tubuh, pengawasan (*panoptic*), dan peraturan-peraturan.

Kata Kunci: Wacana, Pengetahuan, Kuasa, Foucault, Hegemoni, *I La Galigo*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat dengan bahasa. Keberadaan bahasa merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan. Selain sebagai alat komunikasi, fungsi bahasa yang teramat penting yaitu bahasa sebagai alat perekam gagasan. Bahasa dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan ekspresi. Hari ini kita bisa membaca, menikmati serta mendapatkan banyak pengetahuan, baik yang terdapat dalam karya sastra, maupun non sastra karena adanya bahasa yang berhasil mengembang fungsinya sebagai perekam gagasan, ide, pikiran, dan perasaan. Fungsi bahasa ini, kita bisa mengetahui dan belajar berbagai gagasan dan perasaan orang pada masa lampau yang telah direkam dan diabadikan lewat bahasa yang tentunya sangat penting dan berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan rasa, cipta, dan karsa, sehingga dinamika kebudayaan manusia dapat terekspresikan dan terdokumentasi secara baik (Manuaba, 2019).

Bahasa memiliki kedudukan penting dan mendasar terhadap pengertian sastra karena bahasa merupakan medium ekspresi realitas dan imajinasi dalam karya sastra. Bahasa selalu berkesinambungan dengan sastra, sehingga bahasa dan sastra adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengkaji aspek bahasa dalam karya sastra pada dasarnya adalah meletakkan

sastra sebagai proses komunikasi yang dilakukan pengarang dengan penikmatnya. Dalam dunia wacana, karya sastra dikatakan sebagai wacana yang mendekati karya sastra pada penggunaan bahasa atau rasa bahasanya. Selain isinya yang berorientasi imajinatif, sebagai wacana sastra juga tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji hal-hal yang mengandung fakta atau kenyataan dalam karya sastra. Dari segi bahasa, karya sastra juga dapat dibawa ke dalam keterkaitan yang kuat dengan realitas sosial tertentu yang nyata, yaitu lingkungan sosial dimana tempat dan waktu bahasa yang digunakan oleh karya sastra itu hidup dan berlaku (Putri D.S, 2018).

Wacana sastra adalah ekspresi sosial pengarang, yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam interaksinya dengan dunia sosial pada masanya. Wacana sastra itu tercipta melalui interaksi sosial dan juga memperoleh maknanya dalam interaksi sosial itu (Dieni, 2019). Dalam wacana sastra pengarang menghadirkan interaksi sosial, pergulatan ideologi, dan hegemoni sosial dalam narasinya. Hegemoni sosial biasanya dihadirkan untuk mengontrol perilaku, menciptakan dan menjaga batas-batas kuasa, status dan peran kehidupan sosial. Itulah sebabnya karya sastra sebagai wacana biasanya lebih menekankan pada persoalan isi, fungsi, dan makna sosial dari penggunaan bahasa atau biasa juga dikatakan dalam pengertian teks dan konteksnya. Makna konteks bisa sangat luas termasuk di dalamnya pengetahuan dan kekuasaan. Memaknai wacana sastra dapat dilihat dari hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi dan struktur sosial yang melingkupinya (Taum, 2020). Dengan demikian wacana

sastra dapat digali melalui teks-teks bahasa, produksi dan interpretasi teks serta praktek sosiokultural dari sebuah kelompok masyarakat.

Pada kenyataannya karya sastra adalah sumber pengetahuan yang bisa di gunakan untuk memengaruhi pemikiran manusia pada masanya dan hidup di wilayah kulturalnya. Karya sastra dapat mengubah ideologi sekaligus menanamkan ideologi sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, bahkan karya sastra sering kali lebih efektif untuk membujuk orang untuk bertindak secara sukarela seperti yang diinginkan dibandingkan dengan cara-cara lain, sehingga ideologi yang diinginkan pengarang dapat tertanam secara sukarela tanpa paksaan melalui sastra (Wicaksono: 2017). Dengan demikian, melalui karya sastra, ideologi sangat memungkinkan disebarkan dan ditanamkan pada seseorang yang selanjutnya mempengaruhi daya pikir seseorang.

Sejalan dengan pemikiran Wicaksono, Rene Wellek (1993) mengemukakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai dokumen sejarah pemikiran dan filsafat, karena dalam karya sastra tercermin sejarah pemikiran. Secara langsung atau melalui alusi-alusi dalam karya sastra, pengarang senantiasa menyatakan bahwa ia menganut aliran filsafat (ideologi) tertentu, mempunyai paham-paham yang dominan pada zamannya, atau paling tidak mengetahui garis besar ajaran-ajaran atau paham-paham tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui karya sastranya, pengarang dapat menularkan aliran filsafat serta paham-paham yang melekat padanya dan menularkannya pada pembaca karya sastranya.

Pada sisi yang lain, karya sastra seringkali dikaitkan dengan wacana kekuasaan, ideologi dan politik. Hal ini disebabkan karena karya sastra selain merupakan eksperimen moral yang dituangkan oleh pengarang, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya, sastra juga mengungkap berbagai masalah yang dihadapi manusia misalnya masalah maut, tragedi, cinta, harapan, tujuan hidup, pengetahuan, kekuasaan, politik, dan ideologi. Masalah ideologi, kekuasaan dan politik tak luput dari perhatian sastrawan sejak zaman dulu sampai sekarang, dari karya klasik seperti epos *Ramayana*, *Mahabarata*, *La Galigo*, sampai karya kesusastraan kontemporer atau sastra mutakhir tidak terlepas dari masalah ideologi tersebut.

Salah satu yang memperkenalkan konsep wacana kuasa adalah Michel Foucault, tetapi dia berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Marxisme dalam mendefinisikan kekuasaan. Foucault (2012) tidak menempatkan kuasa dalam konsep kepemilikan, tetapi dia meletakkan kuasa sebagai praktik ruang lingkup, kuasa tidak mengacu pada sistem dominasi seseorang atau sekelompok orang, melainkan tersebar dan beragam. Kuasa bisa ditempatkan dalam bingkai hubungan laki-laki dan perempuan, orang tua dengan anak, pemuka agama dan ummatnya, dan lain-lain. Kuasa tersebar dan beragam, melahirkan kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin. Kekuasaan dibentuk dan dilestarikan oleh wacana-wacana yang berkaitan dengan pengetahuan, sehingga sangat penting menganalisis wacana dari pertimbangan elemen kekuasaan atau *power*. Eriyanto (2005) melihat setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak

dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat.

Objek penelitian ini adalah teks terjemahan *I La Galigo* Jilid I dalam korpus NBG 188 yang kodeksnya disusun oleh Arung Pancana Toa. Jilid I *I La Ga Ligo* di terjemahkan Muhammad Salim, Fachruddin Ambo Enre, dan Nurhayati Rahman serta dewan redaksi Sirtjo Koolhof dan Roger Tol yang terdiri dari 525 halaman. Adapun teks, transliterasi dan terjemahan *I La Galigo* jilid I berisi kisah *Mula Ri Olona Batara Guru* yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini menceritakan hadirnya Batara Guru ke dunia tengah (*Ale Lino*) dan bertemu dengan *We Nyilik Tomo* dari dunia bawah (*Uriq Liu*). Hal yang mendasari memilih *I La Galigo* sebagai objek penelitian, karena peneliti berasumsi bahwa karya sastra *I La Galigo* sebagai sastra istana yang menceritakan kisah-kisah purba sosial elit Bugis yang mendasari pengalaman sosial kultural ke masa berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa *I La Galigo* dibuat oleh para elit kerajaan dalam rangka produksi wacana pengetahuan yang selanjutnya berefek untuk melanggengkan kekuasaan kaum bangsawan. Asumsi ini berdasar dari cerita *I La Galigo* sendiri yang memprakondisikan status dan citra bangsawan sebagai elit sosial melalui konstruksi langit (*Botting Langi*) yang memiliki hegemoni sosial-politik terhadap tatanan dunia tengah (*Ale Lino*).

Pada episode awal *I La Galigo* sendiri, diungkapkan bahwa kehadiran manusia di permukaan bumi atas kehendak penguasa langit yang

menginginkan adanya pembimbing agar bumi terang benderang. *I La Galigo* dalam episode *Mula Ri Olona* Batara Guru di gambarkan *To Palanroe/Patoto'e* (tuan) memarahi penjaga ayam (budak) *Rukellengmpoba* bersaudara karena meninggalkan ayam nan beratus di *Ruallete* yang mesti dijaganya. Mereka meninggalkannya selama tiga hari tiga malam, sehingga *Patoto'e* sangat marah kepada ketiganya. Setelah menyembah meminta pengampunan atas kelalaiannya, *Rukelleng Mpoba* bersaudara menceritakan bahwa mereka dari kolong langit di tepi *Peretiwi* (Bumi) dan menyaksikan bahwa keadaan muka bumi dalam keadaan kosong. Mereka kemudian meminta pada *Patoto'e* agar menurunkan seorang keturunannya untuk menjelma dimuka bumi supaya dunia tengah (*peretiwi*) tidak kosong. *Rukellengmpoba* juga mengatakan bahwa engkau (*Patoto'e*) bukanlah Dewata (Tuhan) selama tak seorang pun orang di kolong langit (*Peretiwi*) menyeru Sri Paduka kepada Batara kepada *Patoto'e*.

I La Galigo sebagai karya sastra klasik tentunya mengusung ideologi, pengetahuan, dan kekuasaan bahkan mitos di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya karya sastra Bugis klasik ini bersifat istana sentris yang berkisah tentang kekuasaan para raja atau bangsawan yang tentunya secara umum memproduksi pengetahuan sekaligus mengendalikan kekuasaan. Karya sastra lama seperti hikayat, epos, babad, dan jenis kesusatraan lama lainnya dalam kisahnya menceritakan kekuasaan raja dalam usaha untuk memperluas, mempertahankan atau menjarah harta benda, serta menanamkan ideologi

tertentu, yang secara batinia mengembang gagasan untuk kepentingan kekuasaan.

Membaca *La Galigo*, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memitiskan bahwa kekuasaan itu adalah hal yang berhubungan dengan pencipta, suci dan sakral, sehingga kekuasaan dianggap sebagai kekuatan atau cahaya ilahi. *I La Galigo* memitiskan kekuasaan Batara Guru dipermukaan bumi sebagai keturunan ilahi yang mereka disebut “*To Manurung*”, dalam bahasa sederhananya orang yang diutus dari langit atau keturunan dewa, atau bisa dikatakan manusia setengah dewa. *I La Galigo* menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, dan dari sana masyarakat menganggap kekuasaan “*Tomanurung*” sebagai sesuatu yang tunduk pada suatu kekekalan masa, dari suatu masa ke masa, dari waktu ke waktu, bahkan dari suatu dinasti ke dinasti berikutnya asalkan berhubungan dengan *Tomanurung*.

Kekuasaan raja dan keturunannya begitu kuat dan tidak tergoyahkan dalam cerita *I La Galigo*, hal ini disebabkan karena adanya wacana ideologi yang mensahkan (menguatkan yang telah tertanam ssebagai kebenaran dan pengetahuan bagi masyarakat saat itu. Ideologi tersebut dikonstruksi sedemikian rupa dengan mitos-mitos seperti *To Manurung* adalah keturunan dewata “Tuhan”. Mitos-mitos itu menjadi alat yang ampuh serta mujarab untuk melegitimasi kedudukan dan kekuasaan raja yang mengklaim dirinya sebagai keturunan *Tomanurung*. Masyarakat menerima begitu saja ideologi raja sebagai wakil “Tuhan” yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sebagai pusat kekuatan alam semesta. Untuk memuluskan wacana bahwa

kekuasaan yang tak terbatas maka diceritakanlah kesaktian-kesaktian raja dan keturunannya yang sangat menentukan bagi kehidupan. Misalnya, kesaktian menentukan dalam kesuburan atau kesejahteraan masyarakat seperti cerita dewi padi Bugis *Sangiang Serri* dalam cerita *Meong Paloe* dalam salah satu episode *I La Galigo* yang menentukan kemakmuran negeri dan kesejahteraan hidup rakyat. Penanaman pengetahuan melalui mitos-mitos ini akhirnya menjadi kepercayaan yang sangat diyakini dalam pemikiran masyarakat.

Gambaran relasi kuasa dengan pengetahuan dalam teks *I La Galigo* dapat dilihat dari kutipan “*Kutadahkan kedua tapak tanganku, bak kulit bawang tenggorokanku, semoga tak terkutuk hamba menjawab ucapan Tuanku*. Kutipan ini mengandung arkeologi pengetahuan tentang peringatan-peringatan, ancaman serta hukuman yang disampaikan kepada khalayak untuk tidak melakukan pengingkaran terhadap Dewata (*Patoto'e*). Pernyataan arkeologi pengetahuan ini berelasi dengan geneologi kuasa, dalam hal ini kuasa atas pikiran sebagai bentuk pengontrolan. Kontrol atas pikiran ini melahirkan ideologi kultural pada masyarakat tentang ketidakpatutan seorang hamba (manusia biasa) melakukan pengingkaran terhadap komunitas kedatuan *Patoto'e* sebagai bangsawan murni. Wacana dari kutipan di atas adalah strategi kekuasaan yang dikonstitusikan status dan citra bangsawan sebagai elit sosial untuk mengendalikan, mengancam, memperingatkan dengan tujuan untuk mengontrol objek kuasa.

Berdasarkan asumsi tersebut, dalam hal ini hubungan pengetahuan dengan kuasa atau konsep kekuasaan masyarakat Bugis sangat menarik untuk

digali, baik hubungan antara penguasa tertinggi dengan masyarakatnya, hubungan bangsawan dan budaknya, maupun hubungan sesama masyarakat dalam hal kekuasaan. Mengenai kekuasaan, dalam beberapa catatan naskah klasik termasuk *I La Galigo* di informasikan bahwa kekuasaan diwariskan secara turun temurun melalui kekerabatan yang berpusat pada *Manurung* sebagai sumber awal kekuasaan. Dengan demikian menarik untuk mengungkap hubungan tersebut dengan pendekatan kritis atau analisis wacana kritis. Dalam penelitian ini peneliti memilih model analisis wacana kritis Foucault yang melihat bahwa ada relevansi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam setiap wacana.

Pendekatan post strukturalis atau posmodernisme, memandang budaya termasuk di dalamnya bahasa dan sastra tidak dapat dilepaskan dari wacana yang hadir, dan wacana yang hadir tersebut diproduksi melalui hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Dengan demikian, pendekatan post strukturalis memandang wacana yang hadir dari sebuah budaya adalah produk dari relasi pengetahuan dan kekuasaan. Dengan pandangan postrukturalisme ini, penulis mengasumsikan bahwa *I La Galigo* sebagai sebuah produk budaya, bahasa, dan sastra berisi pengetahuan (*arkeologi*) dan relasinya dengan kekuasaan (*geneologi*).

Kekuasaan dalam penerapannya terhubung dengan bahasa. Dalam hal ini kekuasaan biasanya ditunjukkan melalui bahasa dan bahkan diterapkan atau dilaksanakan lewat bahasa, termasuk dalam hal ini komunikasi bahasa dalam wacana sastra. Hal ini sering kita temukan dalam produksi tulisan-tulisan yang

isinya berupa pengetahuan untuk mengendalikan atau melanggengkan kekuasaan, baik dalam wacana umum maupun dalam wacana sastra. Dengan demikian, bahasa sangat bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, karena bahasa, politik dan kekuasaan tidak bisa dilepaskan dalam artian saling berhubungan.

Perbincangan mengenai bahasa tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan pengetahuan, dan ada bentuk-bentuk kekuasaan yang melandasi di dalamnya. Dengan kata lain perbincangan mengenai bahasa juga tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan kekuasaan yang beroperasi di baliknya. Ada gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, serta kosa kata yang digunakan yang berhubungan dengan pengetahuan yang diungkapkan atau disembunyikan oleh bahasa tersebut. Jadi pada kenyataannya, bahasa tidak bisa dipisahkan dari ajang perebutan hegemoni. Menurut Antonio Gramsci berpendapat bahwa konsep hegemoni tidak hanya berkaitan dengan dominasi politik berupa kekuatan, tetapi juga dominasi melalui budaya termasuk bahasa. Bahasa sebagai ruang simbol-simbol diproduksi dan disebarluaskan dan secara total membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya sebuah perang bahasa atau perang simbol dalam rangka memperebutkan penerimaan publik atas gagasan ideologis yang diperjuangkan (Patria: 2015).

Michel Foucault (2014) berpendapat bahwa pembentukan wacana tidak terlepas dari *power* atau kekuasaan. Beberapa pemikirannya yang terangkum dalam buku *power/knowledge* menunjukkan relasi pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran dalam wacana. Menurutnya, tema-tema apapun

seperti seksualitas, disiplin, dan lain sebagainya beroperasi sebagai jalinan antara kekuasaan dan pengetahuan. Foucault melihat bahasa dari praksis sosial, atau bahasa menjadi peristiwa sosial, dan wacana menjadikan bahasa untuk membuat pernyataan atau cara untuk merepresentasikan pengetahuan dengan topik khusus pada periode sejarah tertentu.

Peristiwa dalam karya sastra tidak hanya sekedar simbolik, tapi dibalik itu banyak hal yang tersembunyi dan penting untuk diungkap. Untuk menemukan atau mengungkap wacana yang tersembunyi perlu dilakukan pembacaan secara kritis dalam memahami makna, mulai dari bangunan tekstual, peristiwa dramatik, serta jejaring kepentingan di luar teks tersebut. Memang pada dasarnya karya sastra pada awalnya harus dipahami melalui pernyataan-pernyataan tekstual, tapi hal itu tidak saja cukup, tetapi penting juga mendalami tentang sesuatu dibalik produksi teks atau wacana tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Michel Foucault (Hidayat: 2019) meyakini adanya keterhubungan wacana dalam karya sastra dan wacana-wacana di luar karya sastra. Keterhubungan itulah yang membentuk formasi dimana kehadirannya ikut mempengaruhi subjek-subjek tertentu dimasa tertentu pula. Michel Foucault berpandangan bahwa wacana sebagai sistem representasi periode tertentu, wacana menyediakan bahasa untuk membuat pernyataan (merepresentasikan pengetahuan), jadi wacana dianggap sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan.

Untuk mendekati pengetahuan dan relasinya dengan kuasa secara kritis, Michel Foucault menawarkan geneologi dalam hipotesisnya di buku

power of knowledge. Foucault (2014) dalam buku tersebut menyatakan bahwa pengetahuan adalah kuasa. Pengetahuan memberi ruang untuk memanifestasikan kekuasaan dalam bidang apa saja dalam suatu insitusi atau lembaga sosial, kelompok, dan lain sebagainya. Baginya, dalam ideologi ada kejahatan-kejahatan atau ancaman yang berlindung pada keamanan episteme dalam membenarkan dominasi kekuasaan. Foucault menyangsikan pengetahuan, menurutnya pengetahuan tidak bebas nilai atau tidak selalu benar. Dalam bermacam-macam pengetahuan sosial, termasuk agama patut diwaspadai dan dibongkar. Banyak ideologi tertentu digunakan untuk melancarkan dominasi dan menguasai individu untuk kepentingan tertentu. Bagi Foucault, pengetahuan melalui diskursus/wacana menyerupai udara yang menyerang tubuh sekaligus menguatkan dan menghancurkan individu-individu.

Bentuk penaklukan individu melalui pengetahuan inilah yang menjadi dasar menelaah pemikiran geneologi dan relasinya dengan arkeologi. Wacana dalam kuasa penting untuk ditelaah, bagaimana regulasi wacana itu bekerja, sarana kegunaannya, strategi-strateginya dalam menggunakan pengetahuan sebagai topeng untuk menguasai individu-individu. Dalam konteks ini pula penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam *I La Galigo* sebagai wacana pengetahuan dengan pemikiran geneologi dan arkeologi Michel Foucault untuk mengetahui kompleksitas pengetahuan yang terdapat dalam karya sastra Bugis Klasik *I La Galigo* dengan relasinya dengan kuasa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produksi wacana pengetahuan (arkeologi pengetahuan) dalam teks *I La Galigo* episode *Mula Riulona Batara Guru*?
2. Bagaimana relasi kuasa dan pengetahuan (geneologi kuasa) Michel Foucault dalam teks *I La Galigo* episode *Mula Riulona Batara Guru*?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan serta menganalisis kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan diskursus (arkeologi pengetahuan) tercipta dalam teks *I La Galigo* episode *Mula Riulona Batara Guru*.
2. Mengeksplorasi dan menganalisis relasi Kuasa dan Pengetahuan dalam teks *I La Galigo* episode *Mula Riulona Batara Guru*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoretis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan linguistik secara umum dan ilmu sastra secara khusus. Manfaat secara

teoritis tentang relasi kuasa dan pengetahuan dalam teks *I La Galigo* dapat dijadikan acuan untuk memperkaya teori Linguistik dalam hal ini analisis wacana kritis dengan pendekatan postruktural (posmodernisme) Michel Foucault.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi mahasiswa (baik disiplin ilmu sastra maupun linguistik), penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran relasi kuasa dan pengetahuan dalam karya sastra, dalam hal ini epos *La Galigo*.
2. Bagi dosen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kepentingan pengembangan pendidikan serta bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang kajian posmodernisme.
3. Bagi peneliti lanjut, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang serupa dengan penelitian ini serta melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.
4. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan mendorong pembaca untuk menyadari bahwa dalam karya sastra mengangkat hal-hal yang kompleks tentang persolan kehidupan masyarakat serta memanfaatkannya sebagai bahan diskusi dan apresiasi bahasa dan sastra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang kuasa dan pengetahuan telah banyak dilakukan pada objek lain, namun kedudukan penelitian ini di antara berbagai penelitian tentang kuasa dan pengetahuan dipandang perlu dilakukan karena dalam hal ini penelitian yang mengkaji *I La Galigo* belum pernah diteliti dengan menggunakan pendekatan ini. Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu, antara lain buku Roger Tol, Kees van Dijk, Greg Acciaioli (2019) yang diterbitkan *Ininnawa* pada tahun 2019 dengan judul buku *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Buku ini berisi gambaran masyarakat Bugis, Makassar dan kelompok etnis lainnya di Sulawesi Selatan dari sudut pandang interaksi kebudayaan dan perdagangan. Adapun konsep status dan kekuasaan yang dibahas dalam buku itu cenderung membahas penguasaan terhadap sumber-sumber hajat hidup seperti tanah dan keterbukaan atau penerimaan para penguasa terhadap pedagang-pedagang asing dari mana saja. Selain itu, buku ini juga membahas keterlibatan hubungan gender dalam berbagai bentuk kepemimpinan dan kekuasaan. Peran perempuan tidak terbatas hanya urusan rumah tangga tetapi bisa untuk menduduki sebagian besar jabatan politik tradisional. Perempuan memiliki kekuasaan dalam bidang politik dan kepercayaan di daerah-daerah perkampungan Sulawesi Selatan. Sebagai contoh kekuasaan informal kaum perempuan dalam bidang

kepercayaan adalah menjadi ‘pemimpin’ ritual tradisional sehari-hari dan penguasa pada kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Garry Potter (2016) dalam *Journal of Critical Realism* dengan judul *POWER AND KNOWLEDGE A Dialectical Contradiction*, penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Selain membenarkan relevansi konsep kekuasaan dan pengetahuan, artikel Potter juga merinci cara kerja teorinya dengan menggunakan contoh sistem pendidikan. Pemahaman tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan merupakan sesuatu yang dialektis di mana pengetahuan dipandang relatif secara historis dan terkait dengan reproduksi hirarkis masyarakat terhadap hubungan kekuasaan. Hubungan-hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan sedemikian rupa diproduksi dan disebarkan melalui lembaga-lembaga termasuk dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan salah satu lembaga yang sangat penting karena sangat erat dengan sosiologi pengetahuan yang secara fundamental membentuk fungsi ideologis.

Penelitian yang relevan yang ketiga yaitu Imran (2017) *Konstruksi Messianisme Jamaah An-nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*. Penelitian ini bertujuan mengurai bagaimana ideologi *Messianistik* dipahami, dikembangkan dan dijalankan. Penelitian tersebut berusaha menelusuri dan menunjukkan kompleksitas relasi wacana kekuasaan yang terdapat dalam berbagai konsep *Messianisme* karena dianggap sebagai sebuah medan kontestasi di mana makna terus menerus dipertaruhkan. Secara umum

penelitian tersebut menelusuri bagaimana *Jamaah An-nadzir* merumuskan paham *Messianistik* mereka dan bagaimana kompleksitas wacana yang membangun konsep *Messianistik* yang mereka pahami, keadaan sosial yang menjadi tempat kemunculannya serta metode kepemimpinan yang mereka terapkan.

Penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Rahman (2008) dengan judul penelitian *Agama, Tradisi dan Kesenian dalam manuskrip La Galigo*, pada penelitian ini mengungkap gambaran itu memperlihatkan kaitan *I La Galigo* dengan agama, tradisi dan kesenian. Penelitian ini memperlihatkan memperlihatkan betapa rumitnya kesenian tradisi, karena di dalamnya terdapat kuasa yang bersangkut paut dengan sukma pemilik kesenian itu. Oleh karena itu, orang yang ingin mengusung kesenian sakral di luar konteksnya tanpa memperhitungkan kesakralannya dan perasaan pendukungnya, akan mendapati sukma ini yang kehilangan aura, dan yang tertinggal hanya onggokan kreatifitas yang tidak berjiwa.

2.2 Landasan Teori

1. Wacana

Wacana berpadanan dengan kata *discourse* dalam bahasa Inggris. Wacana tidak hanya digunakan dalam bidang bahasa dan sastra, tetapi juga dalam bidang ilmu lainnya. Di luar bidang bahasa dan sastra, lebih sering digunakan istilah diskursus untuk menyebut kata wacana. Di bidang linguistik, kata *diskursus* jarang dipakai dibanding kata wacana sehingga *discourse*

analysis menjadi analisis wacana (Van Dijk, 1997). Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kita mengenal istilah wacana dan untuk membedakan satu dengan yang lainnya, hanya ditambahkan kata lisan dan tulis atau wacana lisan serta wacana tulis sebagai ragam wacana.

Lebih lanjut Van Dijk (1997) menyatakan bahwa wacana terdiri atas satu kata, satu kalimat maupun banyak kalimat. Wacana dapat juga dipakai istilah ujaran (*speech*) yang merupakan perpaduan bahasa dan ujaran. Oleh karena itu, wacana dapat berwujud satu kata, satu kalimat, satu paragraf, satu artikel, satu buku, juga dapat berupa beberapa buku, bahkan satu bidang ilmu (Masitoh, 2020). Dalam artikel yang sama juga dikemukakan bahwa wacana adalah bahasa yang bermakna yang dapat berbentuk lisan, tulisan, maupun simbol. Wujud dari bentuk wacana dapat berupa: 1). Dalam bentuk teks berupa pengumuman, karangan, makalah, skripsi, roman, 2). Dalam bentuk ucapan berupa percakapan, tanya jawab, dialog, 3). Dalam lakon berupa drama, sinetron, puisi, atraksi 4). Bentuk artefak berupa bangunan, alat-alat batu, logam, puing, dsb. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak selamanya wacana berbentuk tulisan di media massa maupun di media cetak.

Menurut Tarigan (1987), wacana bukan sekadar suatu kesatuan kalimat yang padu dalam sebuah atau beberapa paragraf. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tulis. Sejalan dengan itu. Badudu dalam Eriyanto (2001) mendefinisikan wacana sebagai rentetan

kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa wacana adalah deretan kalimat yang berkaitan dan berkesinambungan, memiliki kohesi dan koherensi, sehingga kalimat satu dan yang lainnya menjadi padu-padan, membentuk satu kesatuan yang utuh dan mempunyai makna.

Cavallaro yang dikutip dari Silaswati (2019) menyatakan bahwa sebuah wacana dilihat sebagai suatu teks, teks merupakan objek dan data yang selalu terbuka bagi pembacaan dan penafsiran yang beragam. Teks diterima dan dipahami oleh pembacanya sesuai lingkungan budaya dimana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. Jadi teks bersifat intertekstual dan sekaligus subjektif atau dengan kata lain teks juga bersifat intersubjektif. Artinya teks tergantung pada bagaimana penafsiran-penafsiran yang diajukan orang lain terhadap kode-kode dan konvensi-konvensi suatu komunitas, dan dengan demikian disahkan atau ditolak.

Istilah teks dan wacana secara bergantian digunakan dalam analisis wacana. Kress (dalam Silaswati, 2019) mengungkapkan tentang istilah teks dan wacana cenderung digunakan tanpa perbedaan yang jelas. Kajian teks lebih menekankan pada persoalan materialitas, bentuk, dan struktur bahasa, sedangkan kajian wacana lebih menekankan pada persoalan isi, fungsi, dan makna sosial dalam penggunaan bahasa. Dalam arti ini, wacana mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial seperti pernyataan

Fairclough yang sering dikutip bahwa wacana adalah bentuk praktik sosial yang berimplikasi adanya dialektika antara bahasa dan kondisi sosial.

Djajasudarma (2006) menguraikan wacana adalah (1) produk dan praktik budaya masyarakat yang dituturkan atau dilantunkan secara lisan, (2) satu kesatuan pembicaraan atau tuturan seseorang pada suatu kegiatan tertentu, (3) proses dan hasil pembicaraan antara penutur dengan pembicara secara bergantian, dan (4) mengisyaratkan konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi pembicaraan atau tuturan. Dari segi konteks, wacana dilihat bukan dari struktur wacana tersebut, tetapi bagaimana wacana itu diproduksi. Konteks atau model konteks wacana dari perspektif van Dijk (2004:9) terdiri dari sejumlah kategori yakni; setting, peserta, dan tindakan, dengan sub kategori; yakni waktu, tempat, identitas, peran, tujuan, dan pengetahuan. Konteks mengutamakan representasi subjektif diri, peserta pembicara, latar atau setting (waktu dan tempat), karakteristik sosial, dan hubungan antar peserta dengan keseluruhan tujuan, maksud dan target. Model ini juga membentuk tindakan ucapan yang bergantung pada konteks, gaya dan retorika.

Eriyanto (2001) mengatakan bahwa wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya, tidak terwujud dengan begitu saja secara natural, tetapi hal itu juga wujud dari pertarungan kekuasaan karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Contohnya: kekuasaan pria terhadap wanita, kekuasaan pimpinan kepada bawahan, dan dosen dengan mahasiswa. Wacana memandang aspek

kekuasaan sebagai suatu kontrol. Kekuasaan berhubungan erat dengan kelompok dominan. Kelompok dominan biasanya menguasai kelompok yang lemah atau kelompok yang termarjinalkan. Menurut Van Dijk dalam Eriyanto (2001) hal ini terjadi karena biasanya relasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman kelompok dominan lebih baik dan lebih banyak dari pada kelompok yang lemah atau yang termarjinalkan. Hal ini mengisyaratkan siapa sajakah yang diperkenan untuk berbicara dan siapa yang harus mendengar dan mengiyakan. Misalnya, seorang staf/karyawan diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan korupsi. Oleh karena tidak berkuasa untuk menolak, staf/karyawan tersebut harus mendengar dan mengiyakan keinginan dari atasannya.

Analisis wacana atau biasa juga disebut kajian wacana dapat dimengerti sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji wacana. Analisis wacana sendiri biasanya bertujuan untuk mengungkap struktur wacana, komponen pembentuk wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana (Fauzan, 2016). Ada berbagai model dalam pendekatan analisis wacana diantaranya; “pendekatan formal, pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*), pendekatan fungsional, pendekatan analisis isi, pendekatan semiotik, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan etnografi, dan pendekatan hermeneutic dan lain sebagainya”. Setiap pendekatan memiliki penekanan kajian pada aspek tertentu dan untuk tujuan tertentu. Penelitian ini, menggunakan

pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkap relasi kuasa dan pengetahuan dalam teks epos *I La Galigo*.

Pengertian analisis wacana itu sendiri dapat sangat bervariasi. Pengertian ini sangat beragam tergantung pada sikap, kepentingan dari para ahli bahasa yang mengemukakan teori tersebut. Meskipun banyak terdapat perbedaan tentang definisi analisis wacana, tetap ada benang merahnya bahwa analisis wacana merupakan studi tentang bahasa atau penggunaan bahasa. Istilah “analisis wacana” adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa” (Eriyanto, 2001).

Foucault dalam karyanya *Power of Knowledge* menjadikan “kuasa” sebagai kata kunci. Foucault juga mendefinisikan bahwa kekuasaan itu tidak dimiliki melainkan diciptakan oleh hubungan antar pengetahuan. Apabila pandangan Foucault tersebut diaplikasikan dalam mengkaji realitas, maka tidak dapat dipisahkan dengan wacana (diskursus) dan kekuasaan. Foucault juga mengatakan bahwa wacana adalah konstituen kekuasaan, maka wacana melekat makna kekuasaan yang menekankan pada *power* (kekuasaan)/ *knowledge* (pengetahuan). Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan bahwa wacana menimbulkan kebenaran dan pengetahuan, kekuasaan mendorong munculnya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan melalui wacana pengetahuan itu dapat disebarkan.

2. Analisis Wacana Kritis

Menurut Douglas (Mulyana, 2005:3) istilah wacana berasal dari bahasa sansekerta *wac/wak/vak*. Bila dilihat dari jenisnya, kata *wac* dalam lingkup morfologi merupakan kata kerja yang bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi *wacana*. Bentuk *ana* yang muncul di belakang adalah sufiks (akhiran) yang bermakna ‘membedakan’ (nominalisasi). Jadi, kata wacana dapat diartikan sebagai ‘perkataan’ atau ‘tuturan’.

Webster memperluas makna *discourse*, sebagai berikut: (1) komunikasi kata-kata, (2) ekspresi gagasan-gagasan, (3) risalah tulis, ceramah, dan sebagainya. Istilah *discourse* ini selanjutnya digunakan oleh para ahli bahasa dalam kajian ilmu linguistik, sehingga dikenal istilah *discourse* analisis atau disebut analisis wacana, (Mulyana, 2005:4).

Sobur Alex (Yoce, 2009:3) mengungkapkan bahwa wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun non segmental. Wacana adalah proses komunikasi menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, tidak bersifat netral atau steril. Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang

melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat berubah nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain.

Analisis wacana dalam konteks penelitian ini adalah upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Dalam analisis wacana, wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi.

Haryatmoko (2017) mengatakan, Analisis Wacana kritis yang juga dikenal dengan Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan metode di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Model ini diresmikan dalam symposium di Amsterdam 1991 yang dihadiri oleh T. Van Dijk, N. Fairclough, dll. Hasil dari symposium ini kemudian dikenal dengan istilah Analisis Wacana Kritis (AWK). Ada tiga asumsi dasar (postulat) AWK yang dihasilkan: *pertama*, semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial, maka dibutuhkan lintas ilmu; *kedua*, keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematis data semiotik (tulisan, lisan, dan visual); *ketiga*, selalu reflektif dalam proses penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti.

Kekuasaan (*power*) merupakan elemen yang dipertimbangkan dalam analisis wacana kritis. Di sini, setiap wacana yang muncul dalam suatu teks, percakapan atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar

dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar atau pembaca, ia juga bagian dari kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu, (Eryanto, 2005:11). Menurut Foucault (Eryanto, 2005), wacana tidak dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi wacana merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu.

Gagasan tidak bisa diabaikan dalam AWK berasal dari konsep 'wacana' menurut Michel Foucault. Menurut filsuf post-strukturalis ini, wacana merupakan sistem pengetahuan yang memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi, memerintah merupakan bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern. Menurutnya selalu ada hubungan pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran dalam wacana. Wacana dilihat sebagai bahasa dalam praksis sosial, atau bahasa menjadi peristiwa sosial. Jadi wacana menyediakan bahasa untuk membuat pernyataan (cara untuk merepresentasikan pengetahuan) tentang topik khusus dalam periode sejarah tertentu. Praktik-praktik wacana menghasilkan masalah-masalah yang bermakna dan diatur sesuai dengan periode sejarah, artinya struktur pemaknaan yang menentukan suatu periode sejarah tertentu. Logika Foucault

bahwa kekuasaan, kebenaran tidak bisa lepas dari wacana (Haryatmoko, 2017:3-4).

Senada dengan hal tersebut di atas, dalam analisis wacana pendekatan Foucault (Eryanto, 2005:65-66), kuasa tidak dimaknai dalam *term* “kepemilikan”, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Michel Foucault (2012) dalam bukunya arkeologi pengetahuan menjelaskan definisi fenomenal dari wacana beserta potensi politis dan kaitannya dengan kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa *diskursus* atau wacana adalah elemen taktis yang beroperasi dalam kancah relasi kekuasaan. Antara wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, kekuasaan di sini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan tetapi segala sesuatu yang menghegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis. Dari pandangan Foucault tersebut bisa dikatakan bahwa wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan efek kuasa. Dalam hal ini, penguasa atau orang yang

mendominasi senantiasa melanggengkan kekuasaan dengan cara memproduksi wacana melalui struktur diskursif bahasa sehingga orang atau kelompok bisa menerima dan menganggap hal tersebut wajar.

Rahman Selden memberikan penjelasan tentang pemikiran Foucault, bahwa terbukti sudah kekuasaan atau dominasi tertentu ditegakkan dan dilaksanakan melalui wacana, dan sebuah kekuasaan jelas memiliki pengaruh pada pembentukan pengetahuan. Suatu dominasi atau hegemoni tertentu menggunakan wacana sebagai elemen taktis untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ini semua terkait dengan pembangunan sebuah dominasi dan pelestarian kekuasaan (Yoce, 2009: 83-84).

Untuk penerapan Analisis Wacana Kritis yang mengacu pada pemikiran Michel Foucault meliputi dua hal yaitu, metode analisis *arkeologi* pengetahuan dan *genealogi* kuasa. Pada analisis genealogi kuasa; mencari dan memeriksa rangkaian wacana terbentuk, serta analisis hubungan kesejarahan antara kuasa dengan wacana (Hook, 2005). Foucault berpandangan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atas realitas, tetapi kebenaran merupakan hasil kontruksi kewacanaan dan rezim pengetahuan yang menentukan apa yang benar dan salah.

Mayoritas pendekatan analisis wacana kontemporer mengikuti konsepsi Foucault tentang wacana sebagai sederet pernyataan yang relatif terikat pada kaidah sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberi makna. Pendekatan analisis wacana tersebut membangun ide-ide kebenaran sebagai sesuatu diciptakan secara kewacanaan.

3. Arkeologi Pengetahuan

Michel Foucault merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran utama dalam perkembangan analisis wacana kritis melalui karya teoritis dan penelitian praktis. Dalam beberapa penelitian analisis wacana, beberapa pendapatnya banyak dikutip, dimodifikasi, dikomentari, juga dikritik. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi dan geneologi, kendati keduanya tumpang tindih. Teori wacananya membentuk bagian arkeologinya. Menurutnya, melakukan kajian arkeologi berarti menganalisis kaidah-kaidah yang menentukan pernyataan-pernyataan mana yang diterima sebagai kalimat yang bermakna dan kalimat yang benar dalam epos histori tertentu.

Tema besar yang diusung Foucault dalam karya-karyanya menjelaskan tentang hubungan antara ilmu pengetahuan (arkeologi) dan kekuasaan, menurutnya kekuasaan mengontrol dan mendefinisikan ilmu pengetahuan (Wehrle, 2016). Foucault banyak menulis tentang teks yang kemudian dia interpretasikan bahwa selalu ada interaksi pengetahuan dalam hal ini diskursus dan relasi-relasi kuasa yang mempengaruhinya. Foucault memusatkan perhatiannya pada kekuasaan, menurutnya kekuatan bukanlah milik agen-agen tertentu seperti individu-individu atau Negara maupun kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Namun kekuasaan menyebar dalam berbagai praktik sosial yang berbeda, jadi kekuasaan hendaknya tidak dipahami semata-mata sebagai sesuatu yang bersifat menindas, melainkan

produktif; kekuasaan menyusun wacana, pengetahuan, benda-benda dan subjektifitas.

Foucault (2012: 55) menyebut Arkeologi sebagai kondisi-kondisi dasar diskursus. Diskursus didasarkan pada “sesuatu yang telah dikatakan” (*an already-said*); sesuatu yang telah dikatakan ini bukan semata-mata satu frase yang telah diucapkan atau sebuah teks yang telah ditulis, tetapi dia adalah sesuatu yang tidak pernah dikatakan (*a never-said*); diskursus yang tidak nyata, suara halus bagai tarikan nafas, sebuah tulisan yang punya rongga di dalam huruf dan tanda-tandanya. Pengetahuan merupakan satu ruang dimana subyek bisa menempati satu posisi dan berbicara tentang obyek-obyek yang dikenalnya dalam diskursus. Pengetahuan adalah wilayah koordinasi dan subordinasi pernyataan-pernyataan konsep yang tampak, didefinisikan, diaplikasikan, dan ditransformasikan. Pengetahuan ditentukan oleh kemungkinan penggunaan dan penyesuaian yang diberikan oleh diskursus.

Dalam bukunya Arkeologi Pengetahuan dia memaparkan bahwa segala sesuatu yang terformalisasikan dalam diskursus diandaikan telah terartikulasikan pada saat kondisi *semi diam* yang mendahuluinya, yang terus bergejolak di dalamnya, namun menutupi dan membungkam diskursus tersebut. Diskursus yang muncul tidak lebih dari sekedar kehadiran akibat tekanan (represif) dari yang tidak diucapkan; apa yang “tidak dikatakan” ini adalah sebuah rongga yang menjadi cikal bakal dari apa yang dikatakan. Untuk mengetahuinya dibutuhkan interpretasi dalam bentuk “pendengaran”

terhadap “apa yang telah dikatakan” yang pada saat bersamaan juga adalah “yang tidak pernah dikatakan”. Kita harus siap setiap momen peristiwa diskursus ketika dia datang tiba-tiba (*irruption*), diskursus tidak dapat dirujukan pada asal-usul yang jauh di belakang tapi dapat diolah sebagaimana adanya dia ketika muncul.

Foucault (2012:58-59), sebelum mendekati sebuah sains, novel, pidato politik, *oeuvre* seorang pengarang, bahkan juga sebuah buku dengan berbagai tingkat kapasitas, material-material mentah yang sedang dihadapi merupakan sesuatu yang bersifat netral, terdiri atas sekumpulan peristiwa-peristiwa dalam ruang diskursus secara umum. Kita diarahkan untuk memproyeksikan sebuah deskripsi murni peristiwa-peristiwa *diskursif* sebagai sebuah horizon tempat melacak *kesatuan-kesatuan* yang terbentuk di dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam satu sistem linguistik bisa dibentuk hanya dengan menggunakan satu korpus pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta diskursif; namun kemudian kita harus menentukan, berdasarkan cara pengelompokan seperti ini, manakah yang akan memiliki nilai yang akan dijadikan sampel, aturan-aturan yang akan memungkinkan terbentuknya pernyataan-pernyataan lain selain ini; meskipun telah lama menghilang, tidak lagi diucapkan atau hanya bisa direkonstruksi berdasarkan serpihan-serpihan yang jarang ditemui.

Lebih lanjut Foucault menjelaskan, sebuah bahasa (*Langue*) masih tetap berperan sebagai sebuah sistem yang bisa ditempati pernyataan-pernyataan, bangunan aturan-aturan yang terbatas tetapi dengan jangkauan yang tidak terbatas. Wilayah peristiwa-peristiwa diskursif, di lain pihak

merupakan satu pengelompokan yang bersifat terbatas dan setiap saat terikat dengan ruang-ruang linguistik yang telah terformulasikan sebelumnya; meskipun jumlahnya tak terhitung, barangkali melebihi batas catatan, ingatan atau pembacaan, tetapi tetap saja membentuk kelompok yang terbatas (Hassan & Lowry, 2019). Pertanyaan yang diberikan pada analisa bahasa terhadap fakta-fakta diskursif atau lain selalu berbunyi, “atas aturan-aturan seperti apa pernyataan-pernyataan tertentu dibuat?” dan konsekuensinya, “atas aturan-aturan seperti apa pula pernyataan-pernyataan yang sama dibuat?” sedangkan deskripsi peristiwa-peristiwa diskursif mengajukan pertanyaan dengan nada berbeda; “Bagaimana sebuah pernyataan tertentu bisa muncul ketimbang pernyataan-pernyataan lain?”

Deskripsi diskursus ini berada dalam posisi berhadapan-hadapan dengan sejarah pemikiran. Tentu ada juga satu sistem pemikiran yang hanya bisa direkonstruksi berdasarkan satu totalitas diskursif yang terbatas, namun totalitas ini ditangani dengan cara tertentu, yakni seseorang mencoba menemukan dibalik pernyataan-pernyataan maksud dan tujuan, aktivitas sadar yang terdapat dalam apa yang dibicarakan atau dalam bentuk patahan-patahan yang sangat sulit dipahami. Bagaimana kita harus membentuk ulang diskursus lain, menemukan kembali desiran halus, ucapan-ucapan yang tidak ada habisnya yang keluar dari suara yang didengar, membentuk kembali kehalusan dan ketidakterlihatan teks yang bergerak di antaranya. Analisis pemikiran selalu bersifat *alegoris* dalam hubungannya dengan diskursus yang dia mainkan (Portschy, 2020).

Foucault (2012:60-61) menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang diskursus tidak akan berkesudahan: artinya, apa yang sedang dikatakan dalam apa yang telah dikatakan? Analisa wilayah diskursif diarahkan dengan agak berbeda; kita harus menerima pernyataan sebagaimana adanya saat dia muncul; menentukan syarat eksistensinya, menjelaskan batas-batasnya, menentukan korelasinya dengan pernyataan-pernyataan lain yang mungkin tidak termasuk ke dalam wilayah tersebut. Di balik yang termanifestasi, kita tidak mencari-cari desahan separuh diam dari diskursus lain; sebaliknya kita harus memperlihatkan mengapa analisis tersebut tidak bisa menjadi sesuatu yang lain saja, dengan cara bagaimana dia menolak diskursus lain, bagaimana dia bisa memastikan tidak ada lagi tempat yang tersedia diantara diskursus lain. Pertanyaan yang cocok dengan analisa ini bisa diformulasikan sebagai berikut; eksistensi spesifik seperti yang muncul dari sesuatu yang telah dikatakan dan mengapa tidak dari yang lainnya.

Foucault tertarik pada bagaimana kuasa dipraktikkan dalam pengetahuan (*knowledge*), serta bagaimana kebenaran dibentuk melalui praktik-praktik dalam masyarakat. Dalam hal ini Foucault menganalisis yang disebutnya sebagai permainan kebenaran (Folkers, 2016). Sejalan dengan itu, menurut Foucault (Weiss, 2014), sesuatu bisa dikatakan sebagai salah apabila ada kebenaran yang telah lebih dahulu diasumsikan, maka diperlukan membedah bagaimana kebenaran itu diasumsikan. Ketertarikan Foucault pada kebenaran mencakup pada permainan kebenaran, yaitu adanya aturan-aturan,

sumber-sumber serta bagaimana praktik dalam penciptaan yang dikatakan benar bagi manusia di balik pernyataan-pernyataan pengetahuan tersebut.

Foucault (2012:98-100), hukum-hukum operasi yang berlaku di balik pernyataan-pernyataan serta menentukan dari mana mereka datang; pertanyaan pertama, siapa yang berbicara, siapa yang punya hak untuk berbicara dalam bahasa “ini” (*language*). Siapa yang kualifaid untuk itu? Dari mana dia dapatkan kemampuan khusus itu dan dari siapa dia terima, meski tidak ada jaminan bahwa yang dia katakan benar, namun paling tidak tentu ada perkiraan apa yang dikatakan itu benar?, apa status individu – sebagai satu-satunya orang – yang punya hak tersebut, apakah ditunjuk oleh hukum atau tradisi, ditentukan secara yuridis atau jatuh dari langit begitu saja, hingga mampu menawarkan satu diskursus?, kedua, mendeskripsikan situs-situs institusional tempat lahirnya diskursus tersebut, dan dari sinilah diskursus tersebut menerima sumber-sumber serta titik-titik aplikasinya (objek-objek spesifik dan instrument-instrumen verifikasinya).

Adapun regularitas-regularitas diskursif menurut Foucault dalam bukunya *Arkeologi Pengetahuan*, terdiri dari; kesatuan-kesatuan diskursus, formasi-formasi diskursif, pembentukan objek-objek, pembentukan modalitas-modalitas penyampaian, pembentukan konsep-konsep, pembentukan strategi-strategi, pernyataan dan arsip, serta deskripsi arkeologi. Dari hal tersebut inilah yang bisa dipakai dalam mengungkap arkeologi pengetahuan.

Regulasi diskursif ini oleh Foucault dibahas pada karya-karya awalnya mengenai sejarah pengetahuan dengan melihat sejarah pengetahuan itu

sebagai sebuah *episteme*. *Episteme* adalah suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu (Olsson, 2010). Penyelidikannya bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yakni konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan terorganisasi secara tematis sehingga dia menjadi otoritatif dan legitimasi dalam menerangkan segala sesuatu. Hal ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu, baik cara berpikirnya, berbicara maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan. Tema-tema ini dibahas dalam bukunya Arkeologi Pengetahuan yang membicarakan tentang struktur pengetahuan yang disebut sebagai suatu formasi wacana.

Pengertian arkeologi merujuk pada suatu metode tentang penggalian sejarah antropologis yang melihat bahwa sejarah pengetahuan berkembang secara linear (Kamahi, 2017). Suatu pengetahuan dalam pandangan Foucault, dari masa ke masa bukanlah perkembangan evolutif tetapi sebagai bentuk pergeseran satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain pada masa tertentu sebagai sebuah rezim wacana. Arkeologi digunakan untuk menangkap sesuatu yang disebut Foucault sebagai *episteme*. *Episteme* merupakan suatu bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu waktu (zaman) tertentu. *Episteme* dianggap sebagai disposisi pengetahuan yang khas pada waktu tertentu.

Pemantapan pengetahuan yang melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan berlangsung pada level wacana (*discourse*). Melalui *episteme*, strategi beroperasinya kekuasaan dalam pengetahuan dapat diketahui. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan

zaman berdasarkan *episteme*, yaitu mengetahui bagaimana terjadinya rezim pengetahuan di suatu masa dan tentu saja melibatkan beroperasinya kekuasaan (Antoniades, 2003). Foucault sebenarnya mengungkapkan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Dia melihat wacana memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran.

Klaim kebenaran adalah bentuk kekuasaan yang merupakan suatu wacana yang dapat mempengaruhi praktik-praktik sosial. Pada konsep ini wacana dapat bersifat menekan dan menindas dengan kata lain kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif karena wujud kekuasaan tidak nampak sehingga tidak disadari dan dirasakan oleh individu sebagai praktek kekuasaan yang mengendalikan mereka (Howarth, 2010). Rezim wacana mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau tidak, inilah yang menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Rezim wacana menggambarkan disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi pada praktik sosial. Oleh karena itu setiap masa memiliki watak pengetahuan yang khas dengan definisi kebenaran yang khas pula (Kamahi, 2017). Melalui arkeologi, Foucault menunjukkan terjadinya atau beroperasinya kekuasaan dalam membentuk suatu disposisi pengetahuan tertentu.

Arkeologi pengetahuan memungkinkan penyelidikan peristiwa-peristiwa wacana berupa pernyataan-pernyataan yang diperbincangkan atau pun dituliskan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui analisis kearsipan suatu Arkeologi pengetahuan memungkinkan penyelidikan peristiwa-peristiwa wacana pada pernyataan-pernyataan yang dibincangkan maupun dituliskan.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengetahui analisis kearsipan suatu teks. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa penelitian ini terletak pada arsip (dokumen), yang merupakan akumulasi dari keberadaan wacana. Arkeologi adalah analisis wacana dalam bentuk kearsipannya yang menggambarkan wacana- wacana sebagai praksis-praksis yang dikhususkan dalam elemen sebuah arsip (Foucault, 2002).

Adapun prinsip-prinsip penting dalam arkeologi pengetahuan menurut Foucault dalam arkeologi pengetahuan (2012) adalah sebagai berikut;

1. Arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri.
2. Arkeologi bukanlah *doksologi* tapi analisa *diferensial* atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan cara-cara diskursus membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya agar dapat dikenali lebih dekat.
3. Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan *oeuvre*;

dia tidak mencoba menggali momen dimana *oeuvre* tadi muncul di cakrawala tak bernama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain.

4. Arkeologi merupakan sebetuk deskripsi sistematis terhadap obyek-diskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus.

Menurut Foucault (pengetahuan adalah wacana, namun wacana yang dimaksud Foucault adalah relasi-relasi yang menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain di dalam suatu sistem formasi pengetahuan. Dengan demikian, wacana adalah produksi pengetahuan yang terbentuk oleh relasi-relasi tertentu (Foucault, 2002; Ramadhani, 2021). Wacana disampaikan dalam suatu sistem pernyataan-pernyataan, sistem ini terhubung dengan bahasa. Bahasa dengan segala intriknya menghadirkan wacana dimana pengetahuan terserap dengan relasi-relasi yang membentuk pengetahuan tersebut. Foucault menyebut bentuk kegiatan dalam penyelidikan terhadap wacana ini dengan “*arkeologi pengetahuan*”, bagi Foucault penggunaan istilah arkeologi bukan sekedar bermakna ilmu purbakala, melainkan semacam analisis khas terhadap formasi sistem yang membentuk pengetahuan dalam sejarah. Adapun formasi sistem yang membentuk pengetahuan itu, Foucault menyebutnya dengan istilah “*episteme*” (Foucault, 2002: 211). Sistem tersebut tidak pernah terlihat dipermukaan pengetahuan namun ia ada

secara implisit, tugas pembaca atau peneliti pengetahuan adalah menguraikan benang-benang penyusun lembar demi lembar pengetahuan itu. Menurut Foucault, letak pengetahuan dibingkai dan diatur untuk kepentingan-kepentingan tertentu bukan berdasarkan pengetahuan itu sendiri secara esensial.

Dalam Arkeologi ilmu pengetahuan, Foucault yang bercermin pada pembahasan peristiwa peristiwa diskursif, pernyataan-pernyataan yang dibicarakan dan dituliskan. Foucault tertarik pada praktik-praktik diskursif dasar yang membentuk dasar diskursus sains, khususnya dalam ilmu-ilmu manusia. Bagi Foucault, arkeologi dititikberatkan pada objek, sesuatu konteks, artikel-artikel yang tersisa pada masa lalu, monumen diam (Ritzer, 2010:68). Foucault menggambarkan lima tahapan proses untuk menganalisis ranah peristiwa diskursif ini yaitu sebagai berikut; 1). Memahami pernyataan menurut kejadian yang sangat khas, 2). Menentukan kondisi keberadaannya, 3). Menentukan sekurang-kurangnya limitnya, 4). Membuat korelasinya dengan pernyataan yang lain yang mungkin terkait dengannya, 5). Serta menunjukkan bentuk lain pernyataan yang dikeluarkan.

4. Kuasa Pengetahuan (Geneologi)

Michel Foucault merupakan salah satu pemikir postmodernisme yang telah menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal seperti sejarah, episteme, wacana, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran

postmodernisme. Sejauh ini, pemikirannya masih menjadi bahan perdebatan yang hangat dan menarik utamanya pandangannya tentang relasi kuasa dan pengetahuan.

Foucault pada awal perjalanan filsafatnya dipengaruhi oleh marxisme sebagaimana cendekiawan pada tahun 1950-an, kemudian melepaskan diri dari paham itu dan memicu suatu revolusi teori borjuis tentang Negara, juga menentang konsepsi Marxis mengenai kekuasaan dan hubungannya dengan negara. Foucault mempermasalahkan pengertian Marx tentang ideologi dominan. Pengertiannya bahwa dibalik benda dan hal tersembunyi sesuatu menguasainya, dalam artian ada kekuasaan yang tersembunyi dibalik benda tersebut.

Pengetahuan dan kekuasaan adalah tema sentral pemikiran Michel Foucault, walau dari beberapa karyanya tidak menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara eksplisit (Karlsen & Villadsen, 2015). Namun demikian beberapa pemikiran dan hasil wawancara Foucault yang terangkum dalam buku *power/knowledge* menunjukkan adanya relasi kekuasaan dan pengetahuan. Menurutnya, tema-tema apapun seperti seksualitas, disiplin, dan lain sebagainya beroperasi sebagai jalinan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebenarnya Foucault dalam karya-karya awalnya tentang *Historie de la Sexualite* telah menunjukkan hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, sesuatu yang dibicarakan dalam tema-tema seperti kegilaan, disiplin, dan seksualitas, pasti beroperasi pada jalinan antara kekuasaan dan pengetahuan.

Wacana kuasa yang diperkenalkan Michel Foucault berbeda dalam mendefinisikan kekuasaan. Foucault (2012) tidak menempatkan kuasa dalam konsep kepemilikan tapi dia meletakkan kuasa sebagai praktik ruang lingkup, kuasa tidak mengacu pada sistem dominasi seseorang atau sekelompok orang, melainkan dia tersebar dan beragam. Kuasa bisa ditempatkan dalam bingkai hubungan laki-laki dan perempuan, orang tua dengan anak, pemuka agama dan ummatnya, dan lain-lain. Kuasa tersebar dan beragam, melahirkan control dan membentuk individu yang patuh dan disiplin. Kuasa dalam pandangan Foucault bertujuan membentuk individu yang berdisiplin agar menjadi tenaga yang produktif. Salah satu contoh untuk membuktikan bahwa kuasa itu produktif adalah norma atau nilai serta regulasi semacam itu. Hal tersebut menentukan cara berperilaku kita dalam kehidupan sosial, dengan memilah, memilih, serta menentukan mana yang benar dan salah pada sistem moral dan nilai tersebut, maka semuanya akan mengatur ucapan, tindakan, bahkan pikiran kita. Dengan begitu, kuasa tidak dipahami sebagai gambaran yang negatif, menindas, melarang, serta membatasi.

Pengetahuan dan kekuasaan saling bekerjasama dalam pandangan Foucault. Dia meragukan kalau manusia memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang mutlak, maka pengetahuan hanyalah sesuatu yang dikumpulkan dan diputuskan kebenarannya berdasarkan benar oleh sekelompok orang melalui konvensi sosial budaya, dan untuk membentuk kebenaran dibutuhkan tenaga sebagai kekuatan (Fischer, 2019; Coysh, 2017). Berdasarkan hal tersebut, Foucault berpandangan bahwa pengetahuan itu

menjadi kekuasaan yang bersifat memaksa, bagaimana pengetahuan dan kekuasaan itu bekerja? Menurut Foucault, pengetahuan dan kekuasaan bekerja melalui bahasa, karena pada saat seseorang belajar berbicara, pada saat itu pula dia menerima pengetahuan dasar dan aturan-aturan kebudayaan.

Foucault (2008:14-15) menjelaskan kekuasaan (genealogi) dari gabungan ilmu dan peradilan yang merupakan landasan bagi kekuasaan untuk menghukum, yang memberikan pembenaran dan kaidahnya. Maka kekuasaan untuk menghukum diterapkan dimana-mana, sehingga tersamarlah wewenang yang melampaui batas. Kekerasan untuk tubuh memang dikurangi bahkan dihilangkan, tetapi kekerasan digantikan oleh bentuk-bentuk koreksi dan pelatihan yang lebih rumit dan halus.

Genealogi Foucault tidak bisa terlepas dari deskripsi kritis. Karena keduanya saling menggantikan, melengkapi satu sama lain. Sisi kritis analisa berkaitan dengan segenap sistem yang melingkupi diskursus yang berusaha memilah-milah prinsip-prinsip penataan, pengecualian, dan kejanggalan dalam diskursus. Sebaliknya, sisi genealogis dari diskursus berkaitan dengan rangkaian formasi efektif diskursus yang berusaha menggantinya berdasarkan kekuasaan afirmasinya. Kekuasaan yang membentuk domain-domain obyek, dimana masing-masing domain bisa mengafirmasi atau menyanggah kebenaran atau kekeliruan proposisi-proposisi (Umanailo: 2019).

Foucault menyebutkan bahwa penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran yang sebelumnya dikatakan bersifat alamiah, ternyata tidak bisa lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi,

seleksi dan kontrol dari sekian banyak formasi non diskursif. Poin sentralnya adalah bahwa diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mengontrolnya. Foucault mendefinisikan ada empat domain dimana diskursus dianggap membahayakan, yakni: politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan dan secara umum tentang sesuatu yang dianggap benar atau palsu. Sama dengan Nietzsche yang mengidentifikasikan hasrat untuk kebenaran “dan hasrat untuk berkuasa”. Foucault menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Diskursus tentang kegilaan, politik ataupun seksualitas terpahami selama diarahkan pada pencapaian kekuasaan. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif, yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan (Umanilo: 2019).

Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif dan menekan dari insituisi kekuasaan termasuk Negara (Tafon & Saunders, 2015). Kekuasaan dipandang positif dan produktif yang bukan merupakan insituisi atau struktur tapi kekuasaan disini adalah istilah yang Foucault gunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault harus dilihat sebagai relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis (Lilja & Vinthagen, 2018).

Foucault dalam bukunya *The History of Sexuality* (1990: 94-95) menunjukkan ada lima mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan, yaitu:

- a). kekuasaan bukanlah sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau

dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah, tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak, b). relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan ada yang dikuasai, c). kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya, d). relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non subjektif, e). dimana ada kekuasaan disitu pula ada anti kekuasaan (*reistance*), dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan dan tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Analisis Geneologi yang ditawarkan Foucault dimulai dengan penyelidikan karakteristik relasi kekuasaan (*power relation*), yaitu bagaimana beroperasinya kekuasaan dan bagaimana melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan (Raffnsøe & Miller 2019). Bagi Foucault, tidak ada model general hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan karena setiap zaman memiliki karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Hal inilah dia memakai istilah geneologi sebagai perangkat analisis untuk mengetahui strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Kalau arkeologi sebagaimana dibahas sebelumnya terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan, maka geneologi memperluas penyelidikan tentang hubungan pengetahuan dan kekuasaan dalam hal ini strategi kekuasaan (dari arkeologi ke geneologi).

Foucault memusatkan perhatiannya pada kekuasaan, menurutnya kekuasaan bukanlah milik agen-agen tertentu seperti individu-individu atau Negara maupun kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Namun kekuasaan menyebar dalam praktik sosial yang berbeda, jadi kekuasaan hendaknya tidak dipahami semata-mata sebagai sebagai sesuatu yang bersifat menindas, melainkan sesuatu yang produktif; kekuasaan menyusun wacana, pengetahuan, benda-benda dan subjektivitas. Teori Foucault tentang kuasa secara garis besar yaitu (1) kuasa bukanlah milik tapi strategi; (2) kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di mana-mana; (3) kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi; dan (4) kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif.

Foucault menyatakan bahwa apa yang membuat kekuasaan tetap langgeng, apa yang membuatnya bisa diterima, adalah kenyataan bahwa kekuasaan tidak hanya memberi kita kekuasaan untuk berkata tidak, namun kekuasaan melewati dan menghasilkan sesuatu, menimbulkan kesenangan, membentuk pengetahuan, memproduksi wacana. Kekuasaan perlu dianggap sebagai jaringan produktif yang melewati lembaga sosial secara keseluruhan, lebih dari sebagai sesuatu yang bersifat negatif yang fungsinya untuk melakukan penindasan (Marriane dan Louise, 2007: 25-26).

Kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kehidupan sosial. Di dalam kekuasaan, dunia sosial dihasilkan, dan kekuasaan selalu terikat pada pengetahuan-kekuasaan, dan pengetahuan memiliki

praanggapan satu sama lain. Kekuasaan bertanggung jawab atas penciptaan dunia sosial kita dan atas cara-cara tertentu dalam membicarakan dan membentuk dunia ini, dengan demikian mendorong lahirnya cara-cara alternatif pembicaraan dan keberadaan atas sesuatu. Oleh sebab itu, kekuasaan bisa merupakan daya yang produktif sekaligus membelenggu.

Mengenai pengetahuan, pengawinan dilakukan Foucault antara kekuasaan dan pengetahuan memiliki konsekuensi yakni kekuasaan secara erat dikaitkan dengan wacana. Wacana terutama memberikan kontribusi terhadap pemroduksian subjek siapa kita dan objek-objek yang kita ketahui. Konsep Foucault tentang kekuasaan-pengetahuan juga mempunyai konsekuensi-konsekuensi terhadap konsepsinya tentang kebenaran. Foucault menyatakan bahwa tidak mungkin mendapatkan akses kebenaran universal karena mustahil membicarakannya dari posisi diluar wacana, tidak ada jalan untuk lolos dari representasi. Dalam wacana tercipta “efek kebenaran”. Dalam fase arkeologi Foucault, “kebenaran” dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk pemroduksian, pengaturan dan pendifusian kalimat-kalimat. Dalam fase geneologinya, Foucault membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan, dengan menyatakan bahwa “kebenaran” disematkan dalam, dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Karena kebenaran itu tidak bisa tercapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Namun, fokus perhatiannya hendaknya ditujukan pada bagaimana-efek-efek kebenaran itu diciptakan dalam wacana. Apa yang harus dianalisis adalah proses kewacanaan untuk mengonstruksikan wacana-wacana dengan cara yang sekiranya

bisa memberikan kesan bahwa wacana-wacana itu memberikan gambaran-gambaran benar atau salah tentang realitas (Jorgensen dan Mariane, 2007).

Untuk mendekati pengetahuan dan relasinya dengan kuasa secara kritis, Michel Foucault menawarkan geneologi dalam hipotesisnya di buku *power of knowledge*. Foucault (2014) dalam buku tersebut menyatakan bahwa pengetahuan adalah kuasa. Pengetahuan memberi ruang untuk memanasikan kekuasaan dalam bidang apa saja dalam suatu insitusi atau lembaga sosial, kelompok, dan lain sebagainya. Baginya, dalam ideologi ada kejahatan-kejahatan atau ancaman yang berlindung pada kemapanan episteme dalam membenarkan dominasi kekuasaan. Foucault menyangsikan pengetahuan, menurutnya pengetahuan tidak bebas nilai atau tidak selalu benar. Dalam bermacam-macam pengetahuan sosial, termasuk agama patut diwaspadai dan dibongkar. Banyak ideologi tertentu digunakan untuk melancarkan dominasi dan menguasai individu untuk kepentingan tertentu. Bagi Foucault, pengetahuan melalui diskursus/wacana menyerupai udara yang menyerang tubuh sekaligus menguatkan dan menghancurkan individu-individu. Eriyanto (2006) melihat setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat.

Foucault menggunakan konsep geneologi untuk meneliti relasi kuasa dan kesinambungannya serta patahan wacana yang bermain dalam kondisi-kondisi historis tertentu. Foucault mengatakan bahwa tugas geneologi adalah

menelaah cara-cara di mana tubuh ditempatkan dalam sejarah sebagai praktik-praktik pendisiplinan. Geneologi juga melacak wacana-wacana dan praktik-praktik ini secara historis dan menunjukkan bentuk-bentuk pengaturan dan pendisiplinan.

5. Hegemoni

Gagasan tentang hegemoni pertama kali diperkenalkan pada 1885 oleh para marxis Rusia, terutama oleh Plekhanov pada 1883-1984. Gagasan Hegemoni awal bagian dari strategi untuk menggulingkan Tsarisme. Istilah tersebut menunjukkan kepemimpinan hegemoni yang harus dibentuk oleh kaum proletar dan wakil-wakil politiknya yang berusaha mengakhiri Negara polisi Tsaris (Puspita Sari, 2020).

Gramsci mengembangkan konsep hegemoni untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana masyarakat-masyarakat kapitalis diorganisasikan, atau dimaksudkan untuk diorganisasikan, dalam masa lalu dan masa kini. Dalam konsepnya, Gramsci pertama-tama membedakan Negara dengan masyarakat sipil. Negara didefinisikan sebagai sumber kekuasaan koersif dalam suatu masyarakat dan masyarakat sipil didefinisikan sebagai lokasi kepemimpinan hegemoni. Negara yang dikonseptualisasi oleh Gramsci memiliki dua aspek: sarana pemaksaan (polisi dan militer), dan sarana untuk membentuk kepemimpinan hegemoni dalam masyarakat sipil (pendidikan, penerbitan, penyiaran, dan sinema). Gramsci berusaha menunjukkan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat sipil adalah hubungan kekuasaan (Patria Nezar, 2015).

Hegemoni menurut Gramsci merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik, dalam terminologinya disebut 'momen' dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari '*spirit*' ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan Negara sebagai kelas diktator.

Terdapat tiga fase untuk menjadi kelas hegemonik, yaitu: fase ekonomik, fase politik, dan fase hegemoni (Simon, 1999: 34-36). Fase ekonomik atau disebut juga fase negatif adalah wilayah materialistik, wilayah keniscayaan, sesuatu yang tidak terelakkan manusia. Pada fase ini suatu momen ekonomik yang menimbulkan kesadaran satu kelas tentang adanya hegemoni politik. Munculnya alternatif sejarah/historis sangat bergantung pada perkembangan cara-cara produksi, misalnya dari cara produksi manual ke mekanik. Proses tersebut tidak cukup untuk mengubah sejarah. Terjadinya perubahan cara produksi tidak dengan sendirinya mengubah sejarah, tetapi harus diikuti fase politik. Fase politik, fase kedua, yaitu hubungan kekuatan-kekuatan politik yang memungkinkan identifikasi berbagai tingkat homogenitas dan kesadaran politik yang dicapai oleh kelompok yang secara potensial hegemonik. Adapun fase ketiga adalah fase hegemoni atau fase positif, yaitu wilayah kebebasan, suatu proses kreasi pandangan dunia baru yang memperlengkapi massa dengan kategori-kategori pikiran, perilaku,

dalam proses penciptaan satu pandangan dunia baru/*world view*. Fase positif disebut juga fase hegemoni ideologis, elemen-elemen kesadaran yang superstruktural, ideologi, kebudayaan merupakan faktor yang menentukan sifat, ruang lingkup, dan hasil sebuah revolusi. Hegemoni ideologi dapat diartikan sebagai suatu organisasi kesadaran.

Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah kekuasaan yang terjadi berdasarkan rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui kekerasan atau penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni sejatinya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematik sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Cara yang dipakai untuk memenangkan konsensus adalah menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif (idesional) masyarakat melalui produk-produk hegemoni yang dipandang benar secara moral maupun intelektual, sehingga dominasi ide kompromis itu terjadi secara natural dan tidak dipertanyakan lagi (Crehan: 2002).

Hegemoni memiliki keterkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan ideologi, di mana ketiganya bekerja secara simultan, meskipun dapat juga dilihat secara terpisah. Gramsci melihat hegemoni sebagai praktik dua arah dari dua hubungan yang bersifat subordinasi, yakni kekuasaan negara borjuis dan kelas buruh. Salah satu sentrum pemikiran Antonio Gramsci adalah konsepsinya tentang hegemoni. Konsepsi hegemoni Gramsci mengacu kepada hubungan antara apa yang disebutnya "*civil society*" dan "*state*" atau

negara, di mana keduanya ada pada level superstruktur, sebagaimana Gramsci mengacu kepada pemikiran Marx, Gramsci kemudian menjelaskan peran penting kaum intelektual dalam konsep hegemoninya. Menurut Gramsci, hubungan antara kaum intelektual dan wilayah produksi (dalam istilah Marx hubungan produksi) bersifat tidak langsung, tidak seperti kelompok-kelompok sosial yang secara fundamental masuk ke dalam hubungan tersebut (misal: buruh, pemilik modal), tetapi dalam tingkat yang berbeda, yang “dimediasi” oleh keseluruhan produksi yang dihasilkan masyarakat dan kompleksitas wilayah superstruktur, di mana kaum intelektual merupakan para “fungsionaris-nya” (Harjito: 2018).

Dalam aktivitas superstruktural, konsep hegemoni ideologi amatlah penting. Erosi ideologi dari kelas yang berkuasa harus di ikuti penciptaan suatu ideologi baru, satu sistem gagasan baru, sistem kepercayaan dan nilai-nilai baru. Revolusi dapat terjadi bukan bergantung pada kondisi struktural tetapi bergantung pada intelektual termasuk fungsionaris superstruktur atau fungsionaris ideologi. Intelektual berfungsi mengelaborasi ideologi kelompok dominan, memberikan kesadaran akan ideologi itu, dan mentransformasinya menjadi suatu konsepsi ideologi yang kemudian harus disebarakan kepada seluruh masyarakat. Intelektual yang menjalankan fungsi demikian disebut intelektual organik karena mereka membentuk suatu hubungan organik antara kelas sosial yang direpresentasikannya dengan superstruktur. Intelektual organik merupakan intelektual kelas yang berkuasa atau kelas dominan. Intelektual organik berposisi dengan intelektual tradisional. Setiap kelompok

yang hendak meraih kekuasaan harus menyerap intelektual-intelektual tradisional untuk melawan intelektual organik. Selain intelektual organik dan intelektual tradisional, terdapat intelektual kolektif. Intelektual kolektif disebut Gramsci sebagai partai. Partai adalah himpunan intelektual kolektif (Harjito: 2014).

Ideologi adalah semua sistem besar yang memberikan orientasi kepada manusia. Karena merupakan sistem besar, ideologi mempunyai pengikut. Hal ini berarti ideologi bersifat kolektif. Ideologi berada di wilayah superstruktur atau kesadaran dan menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang, lembaga-lembaga pemerintah, institusi pendidikan, organisasi-organisasi, organisasi industri, perusahaan komersial, atau serikat dagang (Harjito: 2014).

Penataan terhadap kesadaran disebut hegemoni. Hegemoni dibedakan dengan dominasi yang merupakan penataan terhadap kekuatan material. Hegemoni global bukan saja meliputi kelompok yang sedang berkonflik memperebutkan kekuasaan, tetapi juga melibatkan dan mengikutsertakan kelompok-kelompok di luarnya. Kelompok tersebut dapat berupa kelompok-kelompok pecinta lingkungan, penyayang binatang, feminis, dan lain sebagainya. Hegemoni berciri adanya konsensus, yaitu penerimaan menyeluruh dari berbagai kelompok yang berbeda. Agar diterima berbagai kelompok yang berbeda dan mencapai konsensus dibutuhkan negosiasi. Manusia tidak hanya menerima secara pasif kotak-kotak ideologi yang ada, tetapi justru menegosiasikan ideologi-ideologi sesuai dengan tujuannya. Peranan aktif manusia adalah bagaimana manusia menegosiasikan

ideologinya. Hegemoni ideologi muncul dalam teks-teks, baik yang diproduksi kelompok yang berkuasa (kelompok dominan) maupun kelompok di luarnya (kelompok subaltern). Teks merupakan bagian dari praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai bagian. Keseluruhan adalah struktur masyarakat yang berada di luar teks. Dengan memperhatikan keseluruhan dicek kembali formasi ideologi yang telah ditemukan dalam teks. Dari sudut pandang ini, struktur kualitatif mengacu kepada bagaimana hubungan teks dan pengarangnya dengan situasi historisnya (Harjito: 2014).

Salah satu dari sekian orang yang mengembangkan teori Gramsci adalah Raymond Williams. Menurut Williams (Sukmana: 2015), kebudayaan bukan sekedar alat dominasi. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai bentuk bahasa kooperatif, sebagai kontribusi kesadaran. Dalam pandangan Williams, konsep hegemoni Gramsci terlalu seragam, statis, dan abstrak. Williams berpendapat hegemoni tidak pernah menjadi singular, tetapi sebuah struktur kompleks, berkelanjutan untuk selalu diperbaharui, dikreasi dipertahankan, dan dimodifikasi.

Menurut Williams (Faruk, 2000: 6-7), dalam studi kultural konsep hegemoni mengimplikasikan banyak pengertian baru yang dapat membuka jalan atas pemahaman mengenai gejala kebudayaan sebagai sesuatu yang otonom. Setidak-tidaknya ada empat konsep hegemoni. Satu, hegemoni mengandung konsep kebudayaan sebagai cara hidup menyeluruh berkait dengan proses sosial, tetapi tetap mempertahankan gagasan kekuasaan dan perjuangan. Dua, hegemoni melampaui konsep ideologi karena memberikan

tekanan kepada persoalan kesepakatan atas tatanan sosial yang berkuasa sebagai proses sosial yang dihayati, bukan dipaksakan. Tiga, hegemoni tidak mengizinkan reduksi karya dan aktivitas kultural hanya pada superstruktur, tetapi menjadi proses dasar dari formasi sosial sebagaimana hegemoni bekerja dan diperjuangkan. Empat, hegemoni mengandung konsep kebudayaan sebagai proses, bukan sebagai satu bentuk dominasi pasif, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus diperbaharui, diciptakan kembali, serta dimodifikasi.

Konsep hegemoni Gramsci digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap teori Foucault, sebab menurut Gramsci teori hegemoni meliputi sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya terdapat kelompok penguasa (dominan) yang menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam suatu masyarakat melalui konsensus terhadap kelompok yang dikuasai atau didominasi. Teori hegemoni Gramsci yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan argumentasi bahwa teori ini dianggap relevan untuk membedah permasalahan yang berhubungan dengan kekuasaan

6. Sastra dan *I La Galigo*

Karya sastra lahir atau tercipta dari suatu proses kreatifitas seorang pengarang terhadap realitas kehidupan sosial pengarangnya. Karya sastra dapat mencerminkan zaman dan situasi melalui proses kreatifitas dari pengarang terhadap realitas kehidupan sosial. Sastra menyodorkan ekspresi kepada penikmatnya tentang manusia dan kebudayaannya. Di dalamnya tercakup kompleksitas ideologi, dunia nilai, norma hidup, estetika, pandangan

dunia, tradisi, dan variasi-variasi tingkah laku manusia di dalam kebudayaannya. Setiap karya sastra pada hakekatnya merupakan suatu reaksi terhadap suatu keadaan yang dikonkritkan dalam satu karya.

Pengertian sastra sebagai tulisan memang tidak dapat dielakkan karena secara etimologis sastra itu sendiri berarti tulisan, namun pengertian ini tidak dapat diberlakukan secara penuh karena banyak hasil-hasil karya manusia yang berupa tulisan tidak dimasukkan dalam kategori sastra (Faruk, 2010:39). Menurut Eagleton, novel (prosa fiksi) cenderung dipahami sebagai wacana yang bercerita mengenai peristiwa-peristiwa yang sekaligus fiksional dan faktual. Produksi ide atau gagasan dalam sastra terangkai dengan hubungan material antar manusia, hubungan ini kemudian merembes pada pemahaman dan pemikiran. Seseorang tidak mungkin melahirkan gagasan tanpa hubungan yang aktif antar sesama.

Pada kenyataannya karya sastra adalah sumber pengetahuan yang bisa di gunakan untuk mempengaruhi pemikiran tertentu. Karya sastra dapat mengubah ideologi dan menanamkan ideologi sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, bahkan sebuah karya sastra sering kali jauh lebih efektif untuk membujuk orang untuk bertindak secara sukarela seperti yang diinginkan dibandingkan dengan cara-cara lain sehingga ideologi yang diinginkan pengarang dapat tertanam secara sukarela tanpa paksaan melalui sastra (Wicaksono: 2017).

Rene Wellek (1990) mengemukakan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai dokumen sejarah pemikiran dan filsafat, karena dalam karya

sastra mencerminkan sejarah pemikiran. Secara langsung atau melalui alusi-alusi dalam karya sastra, kadang-kadang pengarang menyatakan bahwa ia menganut aliran filsafat tertentu (ideologi), mempunyai paham-paham yang dominan pada zamannya, atau paling tidak mengetahui garis besar ajaran-ajaran paham-paham tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui karya sastranya, pengarang tersebut dapat menularkan aliran filsafat serta paham-paham yang melekat padanya dan menularkannya pada pembaca karya sastranya.

Wacana sastra adalah ekspresi sosial pengarang, yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam interaksinya dengan dunia sosial. Wacana sastra itu tercipta melalui interaksi sosial dan juga memperoleh maknanya dalam interaksi sosial itu (Dieni: 2019). Dalam wacana sastra pengarang menghadirkan interaksi sosial, pergulatan ideologi, dan hegemoni sosial dalam narasinya. Hegemoni sosial biasanya dihadirkan untuk mengontrol perilaku, menciptakan dan menjaga batas-batas kuasa, status dan peran kehidupan sosial. Makanya karya sastra sebagai wacana biasanya lebih menekankan pada persoalan isi, fungsi, dan makna sosial dari penggunaan bahasa atau biasa juga dikatakan dalam pengertian teks dan konteksnya. Makna-makna konteks bisa sangat luas termasuk di dalamnya pengetahuan dan kekuasaan. Memaknai wacana sastra dapat dilihat dari hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi dan struktur sosial yang melingkupinya (Taum: 2020).

I La Galigo sebagai karya sastra klasik juga termasuk mengusung ideologi, pengetahuan, dan kekuasaan bahkan kepercayaan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya karya sastra tradisional bersifat istana sentris yang berkisah tentang kekuasaan para raja atau bangsawan yang tentunya secara umum memproduksi pengetahuan dalam mengendalikan kekuasaan. Biasanya karya sastra lama seperti hikayat, epos, babad, dan jenis kesusatraan lama lainnya dalam kisahnya menceritakan kekuasaan raja dalam usaha untuk memperluas, mempertahankan atau menjarah harta benda, serta menanamkan ideologi tertentu, dan lain sebagainya untuk kepentingan kekuasaannya.

I La Galigo adalah salah satu bentuk kesusastraan Bugis klasik. Menurut Mattulada, (1985:8-9) *I La Galigo* bersumber dari *panggaderreng* (adat) yang pada awalnya berupa mantra dan kepercayaan mitologi yang ditulis dalam aksara lontara. Aksara lontara sendiri bersumber dari anggapan yang berpangkal dari kepercayaan dan pandangan mitologis Bugis-Makassar yang memandang alam ini sebagai *Sulapa Eppaq Walasuji* (segi empat belah ketupat). Bahwa alam ini adalah satu kesatuan yang dinyatakan dengan simbol *Sa* yang berarti *Seua* (tunggal atau Esa) yang nantinya menjadi pusat dalam kepercayaan Bugis klasik.

Mattulada (1995), berpendapat bahwa ada empat babakan dan empat jenis sastra Bugis yang pernah tumbuh dan berkembang pada masa lalu. Periode awal diwakili oleh sastra *galigo* (mitos), periode berikutnya yaitu sastra pau-pau (legenda), kemudian disusul dengan periode tolok (kisah

kepahlawanan), dan yang terakhir periode (di sini lontarak tidak dimasukkan sebab tidak tergolong karya sastra). Mengenai kepustakaan Bugis klasik ini, dapat dikatakan bahwa secara garis besarnya dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu pustaka yang tergolong karya sastra dan pustaka yang bukan karya sastra. Pustaka yang tergolong karya sastra juga terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu puisi dan prosa. Karya sastra yang tergolong puisi (disebut surek) terbagi lagi ke dalam empat kelompok atau empat jenis, yaitu galigo, pau-pau, toloq.

Pustaka Bugis klasik yang tergolong karya sastra terdiri dari beberapa bentuk, seperti cerita rakyat atau legenda (puisi naratif atau wiracarita), dongeng, dan hikayat (Mattulada, 1980). Karena fokus penelitian ini adalah *I La Galigo* maka hanya membahas tentang pustaka Bugis klasik *Galigo*. *I La Galigo* merupakan karya sastra periode awal dalam kesusastraan Bugis klasik yang dibangun dengan pola kaki sajak lima atau empat suku kata yang secara konsisten membentuk larik dan ceritanya umumnya panjang. Menurut Enre (1999), kesatuan larik pada puisi *I La Galigo* didasarkan pada dua satuan irama dengan sebuah jeda di tengah. Dikatakan sebagai dasar, sebab mungkin ada kalanya satu larik harus terdiri atas tiga satuan irama (15 suku kata), mengingat pertalian maknanya yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Setiap pembentukan lari pada *I La Galigo* yaitu, dua kaki sajak yang masing-masing merupakan kata atau kelompok kata terdiri atas lima atau empat suku kata.

Sastra *Galigo* tergolong ke dalam jenis mite (*myth*), yaitu cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang empunya cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa (keturunan dewa). Adapun peristiwa dalam karya sastra jenis mite biasanya terjadi di dunia lain atau dunia yang biasa tidak kita kenal dan terjadi pada masa lampau. Sebagai karya, mite juga biasa disebut karya sastra jenis epik, karena setiap episode *I La Galigo* memiliki alur tersendiri dan peristiwa-peristiwanya tersusun dengan urutan kronologis yang mengarah pada suatu akhir atau penyelesaian, Enre (1999).

I La Galigo merupakan salah satu karya sastra terpanjang di dunia, karya sastra ini juga di kenal dengan istilah *Sureq La Galigo*. Sebagai karya sastra, *I La Galigo* telah diakui oleh badan dunia UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada tahun 2011 yang menetapkan bahwa naskah *I La Galigo* ini merupakan warisan dunia dan diberi penghargaan sebagai *Memory of The World* (MOW). Karya sastra ini berkembang sebagian besar melalui tradisi lisan dan dinyanyikan. Cerita *I La Galigo* hampir sepenuhnya mengisahkan tentang Sawerigading, seorang pahlawan yang dikenal gagah berani dan juga perantau. Menurut Enre (1999), cerita *I La Galigo* yang tersebar di Sulawesi Selatan didominasi oleh tokoh bernama Sawerigading, manusia keturunan dewa sekaligus ayah dari *La Galigo*. Sawerigading dianggap sebagai peletak dasar munculnya kerajaan di Sulawesi Selatan sehingga Sawerigading dikaitkan dengan simbol-simbol mitologis setiap kerajaan.

I La Galigo merupakan sebuah teks Bugis kuno yang berasal dari abad ke-13, masa sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan, namun masa penulisannya diperkirakan berlangsung pada abad ke-14. Masa dinasti *I La Galigo* berkuasa dan hidup diperkirakan selama enam generasi turun-temurun di beberapa kerajaan di Sulawesi-Selatan dan daerah di sekitarnya (Pelras, 2006). Lebih lanjut Pelras (2006: 35) mengatakan bahwa hingga memasuki abad ke-20, naskah *I La Galigo* secara luas diyakini oleh masyarakat Bugis sebagai suatu kitab yang sakral, dan tidak boleh dibaca tanpa didahului dengan ritual tertentu. Setiap pemilik naskah tidak memperbolehkan naskahnya dibuka oleh orang lain, dan jika dianggap penting untuk dibuka, maka harus dibuatkan ritual untuk membuka naskah tersebut, misalnya terlebih dahulu menyembelih seekor sapi sebagai bentuk ritualnya (PaEni, 2000).

Sebagai naskah yang dianggap sakral, *I La Galigo* dalam pandangan orang Bugis memiliki beberapa fungsi, antara lain dapat menyembuhkan penyakit tertentu dan dibacakan dalam berbagai upacara, karena jika naskah ini tidak dimuliakan maka bisa mendatangkan bencana. Berdasarkan pandangan tersebut maka, naskah *I La Galigo* pada waktu dulu banyak dibaca pada saat seseorang naik rumah baru, pada malam berjaga-jaga saat hendak menabur benih atau saat ada pesta perkawinan, dengan harapan agar pekerjaan yang mereka hadapi akan terhindar dari segala macam kesulitan dan bencana. Tradisi pembacaan dalam pelaksanaan ritual disebut dengan *massureq* atau

maggaligo, yaitu membaca sambil melagukan naskah *I La Galigo* tersebut (Enre, 1999).

I La Galigo merupakan salah satu karya sastra terbesar di dunia, Menurut R.A. Kern dalam Akhmar (2018), seorang ahli sastra dan bahasa Bugis serta penyusun katalog naskah-naskah *La Galigo*, jumlah halamannya kira-kira 6000, setiap halaman folio mengandung sekitar 50 baris yang jumlah suku katanya antara 10 dan 15 suku kata. *I La Galigo* sebenarnya tidak terdapat dalam bentuk yang lengkap, setiap naskah yang masih ada mengandung satu atau dua episode yang pada umumnya mudah dihubungkan dengan episode-episode yang lain.

I La Galigo merupakan karya sastra lama yang tergolong mitos. Dalam tulisan ini definisi mitos mengikuti pendapat pakar kesusastraan klasik yang mengatakan bahwa sastra mitos dianggap oleh masyarakat penciptanya sebagai sastra suci dan dikeramatkan; baik tokoh maupun peristiwanya dianggap benar-benar pernah ada dan pernah terjadi, meskipun tidak dapat dibuktikan dalam kenyataan. *I La Galigo* sebagai karya sastra yang memiliki beberapa fungsi sosial dalam masyarakat Bugis di masa lalu, antara lain: sebagai sastra suci, sastra berguna, dan sastra indah.

Sebagai sastra suci, *I La Galigo* berfungsi sebagai pelindung terhadap ancaman kebahagiaan hidup dan menjalin hubungan individu dengan penguasa serta para dewa; sebagai sastra berguna, galigo berfungsi mendorong terciptanya integritas sosial, memelihara stabilitas sosial dan kelestarian budaya serta kepercayaan; dan sebagai sastra indah, galigo mampu

menggugah perasaan, menawan hati, dan membangun citra masyarakat penikmatnya dalam waktu yang cukup lama (Enre: 1999).

Selain nilai kesusastraannya yang tinggi, ada banyak nilai yang bisa digali dalam *La Galigo*, ada nilai religi, tradisi, kesenian, termasuk nilai kesejarahan atas epik ini. *To Mannurung* sebagai salah satu tema yang diceritakan dalam karya sastra ini bagi masyarakat Bugis menjadi identitas komunitas, utamanya bagi para bangsawan dijadikan acuan dalam menyusun silsilah darah kebangsawanannya. Adapun nilai ilmu pengetahuan yang mendasar dalam *I La Galigo* adalah pengetahuan tentang kebudayaan secara umum yang berkembang di masanya. Hanya saja sebagian dari masyarakat Bugis yang semestinya menjadi pewaris tidak memperhatikan warisan budaya tersebut. Padahal dalam cerita *I La Galigo* kita bisa menggali banyak hal termasuk nilai ideologi kultural suku Bugis di masa lalu dalam hubungannya di masa kini. Di antara sekian nilai yang menjadi semangat *La Galigo*, penulis memfokuskan pada adanya relasi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam cerita karya sastra tersebut. Penulis menganggap bahwa ideologi dan kekuasaan dapat mengorganisasi keyakinan-keyakinan, pengetahuan, pola pikir, dan perilaku masyarakat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula, hal ini tentunya menarik untuk dikaji.

Adapun beberapa penelitian terdahulu tentang *I La Galigo* yang pernah dilakukan antara lain; Nurhayati Rahman (2008) dengan judul penelitaian *Agama, Tradisi dan Kesenian dalam manuskrip Lagaligo*, pada penelitian ini mengungkap gambaran itu memperlihatkan kaitan *I La Galigo* dengan agama,

tradisi dan kesenian. Penelitian ini memperlihatkan memperlihatkan betapa rumitnya kesenian tradisi, di dalamnya terdapat kuasa yang bersangkutan paut dengan sukma pemilik kesenian itu. Oleh karena itu, orang yang ingin mengusung kesenian sakral di luar konteksnya tanpa memperhitungkan kesakralannya dan perasaan pendukungnya, akan mendapati sukma ini akan kehilangan auranya, dan yang tertinggal cuma onggokan kreatifitas yang tidak berjiwa.

Penelitian lainnya dilakukan Besse Paikah (2017) dengan judul penelitian *Nilai Karakter Manusia Bugis dalam I La Galigo Episode Mula Riulona Batara Guru Suatu: Kajian Hermeneutika*, hasil ini penelitian ini menunjukkan nilai karakter yang terdapat dalam *I La Galigo* Jilid I dan *I La Galigo* Jilid II adalah sebagai berikut: Nilai personal: belas kasih ‘esse babua’, bertindak patut, cerdas dan rajin, cermat, harga diri ‘siri’, hati yang baik, jujur, kemandirian, kerja keras atau etos kerja ‘reso’, kesabaran, kesempurnaan dan hidup, kesesuaian ucapan dan perbuatan ‘ada na gau’ atau kesesuaian dan tindakan, keteguhan pendirian atau konsisten atau konsekuen ‘getteng’, otonom, pantang putus asa atau sabar, rasa perih ‘pesse’, rasa wajib: motivasi, kemauan, niat, dan tekad, seniman, tidak sombong atau rendah hati. Nilai sosial: berpikir sebelum bertindak, dermawan, kasih sayang, kebersamaan (gotong royong), kejujuran dan perkataan yang benar ‘lempu sibawa ada tongeng’, kepatuhan terhadap orang tua, keyakinan dan watak sejati, komunikatif mencari kebenaran, menerima pandangan orang lain, menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarganya, partisipatif, setia kawan

(solidaritas), tanggap terhadap lingkungan, tanggungjawab dan kasih sayang. Nilai religius: kebesaran, kekuatan usaha dan permohonan kepada tuhan, keluhuran, kemuliaan. Selain itu, ditemukan: nilai estetika, demokratis, moral, hormat, budaya, peduli sosial, percaya diri, dan bersahabat.

Penelitian relevan lainnya terhadap Lagaligo dilakukan oleh Zulfikar (2017) *Internalisasi Nilai-Nilai Sastra I La Galigo dalam Forum Internasional*, penelitian ini merekomendasikan hendaknya peraturan di tingkatan provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi landasan agar calon diplomat dari provinsi Sulawesi Selatan memiliki bekal berupa nilai-nilai sastra *I La Galigo* untuk diterapkan dalam aktivitas hubungan antar-bangsa yang akan dijalinnya. Adapun temuan penulis dalam sastra *I La Galigo* ini terdapat 7 nilai yang dapat diterapkan dalam hubungan antar-bangsa yakni: (1) harga diri, (2) kejujuran, (3) kebijaksanaan, (4) kesabaran, (5) kekeluargaan, (6) kedermawanan, dan (7) kebanggaan.

7. Kerangka Pikir

I La Galigo sebagai teks mengusung wacana ideologi, pengetahuan, dan kekuasaan bahkan kepercayaan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya karya sastra tradisional bersifat istana sentris yang berkisah tentang kekuasaan para raja atau bangsawan yang tentunya secara umum memproduksi pengetahuan dalam mengendalikan kekuasaan. Biasanya karya sastra lama seperti hikayat, epos, babad, dan jenis kesusastraan lama lainnya dalam kisahnya menceritakan kekuasaan raja dalam usaha untuk memperluas, mempertahankan atau menjarah harta benda, serta menanamkan ideologi tertentu, dan lain sebagainya untuk kepentingan kekuasaannya.

Hubungan pengetahuan dengan kuasa atau konsep kekuasaan masyarakat Bugis dalam hal ini yang terdapat dalam wacana karya sastra klasik *I La Galigo* sangat menarik untuk digali, baik hubungan antara penguasa tertinggi dengan masyarakatnya, hubungan bangsawan dan budaknya, maupun hubungan sesama masyarakat dalam hal kekuasaan. Mengenai kekuasaan, dalam beberapa catatan naskah klasik termasuk *I La Galigo* diinformasikan bahwa kekuasaan diwariskan secara turun temurun dari kekerabatan yang berpusat pada *To Manurung* sebagai sumber awal kekuasaan. Dengan demikian sangat menarik mengungkap hubungan tersebut dalam pendekatan kritis atau analisis wacana kritis. Sehingga dalam penelitian ini dipilih model analisis wacana kritis Foucault yang melihat bahwa ada relevansi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam setiap wacana.

Analisis wacana dalam konteks penelitian ini adalah upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Dalam analisis wacana, wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi. Adapun bentuk analisis wacana dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model AWK Michel Foucault.

Untuk penerapan Analisis wacana kritis yang mengacu pada pemikiran Michel Foucault meliputi dua hal yaitu, metode analisis genealogi kuasa dan analisis arkeologi pengetahuan. Foucault menggambarkan lima tahapan proses untuk menganalisis ranah peristiwa diskursif ini yaitu sebagai berikut; 1). Memahami pernyataan menurut kejadian yang sangat khas, 2). Menentukan kondisi keberadaanya, 3). Menentukan sekurang-kurangnya limitnya, 4). Membuat korelasinya dengan pernyataan yang lain yang mungkin terkait dengannya, 5). Serta menunjukkan bentuk lain pernyataan yang dikeluarkan. Pada analisis genealogi kuasa; mencari dan memeriksa rangkaian wacana terbentuk, serta analisis hubungan kesejarahan antara kuasa dengan wacana (Hook, 2005). Foucault berpandangan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atas realitas, tapi kebenaran merupakan hasil konstruksi kewacanaan dan rezim pengetahuan yang menentukan tentang apa yang benar dan salah. Analisis geneologi Foucault dilakukan dengan penyelidikan mengenai karakteristik kekuasaan,

bagaimana kekuasaan itu beroperasi dan bagaimana melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang disebut dari arkeologi ke geneologi.

Adapun indikator dalam memahami Geonologi dalam penelitian ini berdasarkan Teori Foucault tentang kuasa secara garis besar yaitu (1) kuasa bukanlah milik tapi strategi; (2) kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di mana-mana; (3) kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi; dan (4) kuasa tidak bersifat desktruktif melainkan produktif. Relasi kuasa dan pikiran (pengetahuan) dalam pandangan Foucault dapat ditemukan dalam bentuk relasi kuasa dan pikiran dan bentuk relasi kuasa dengan tubuh. Relasi kuasa dan pikiran dapat digali dari kepercayaan, budaya, politik, ideologi, serta institusi yang menghasilkan bentuk manipulasi, kontrol, objektivasi dan dominasi atas pikiran. Adapun bentuk relasi kuasa dengan tubuh berbentuk manipulasi, kontrol, dan objektivasi terhadap tubuh yang disebarkan melalui varian politik, kapitalisme, *panopticon*, serta peraturan.

Konsep hegemoni Gramsci digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap teori Foucault, sebab menurut Gramsci teori hegemoni meliputi sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya terdapat kelompok penguasa (dominan) yang menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam suatu masyarakat melalui konsensus terhadap kelompok yang dikuasai atau didominasi. Teori hegemoni Gramsci yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan argumentasi bahwa teori ini dianggap relevan untuk membedah permasalahan yang berhubungan dengan kekuasaan.

Adapun Bagan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut;

